



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Sultan Trenggono Nomor 16 Katonsari Demak Kode Pos : 59515
Telp. (0291) 685863 Fax. (0291) 685863
<http://www.demakkab.go.id> e-mail : perhubungan@demakkab.go.id

Demak, 24 Juli 2024

Nomor : 090/1669
Lampiran: 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Verifikasi
Rancangan Renja Tahun 2025

Yth. Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Demak
di -
Demak

Berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan permohonan Verifikasi Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2025.

Demikian permohonan ini, atas bantuan dan kesediaannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Demak,

Ariel Sudaryanto, S.Sos, M.Si. ⑦
Pemuda Utama Muda
NIP. 197005181990011001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 272-273), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 (Pasal 11) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak merupakan dokumen perencanaan kerja yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Dinas Perhubungan dalam periode tahun anggaran 2025. Rencana Kerja (Renja) OPD yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) OPD dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang dijadikan juga sebagai tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Dalam persiapan penyusunan Renja Dinas Perhubungan dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan Dinas Perhubungan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Dinas Perhubungan tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja

Dinas Perhubungan, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Dinas Perhubungan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif urusan Perhubungan;
- c. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Dinas Perhubungan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif urusan Perhubungan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) OPD memuat kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan perangkat daerah sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak mempunyai arti penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Renja perangkat daerah merupakan masukan utama bagi dokumen RKPD, Renstra Dinas Perhubungan dan RPJMD, serta selanjutnya sebagai dokumen resmi Renja untuk proses penyusunan RKA Dinas Perhubungan, KUA, PPAS, dan RAPBD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan berfungsi menjabarkan Renstra (Rencana Strategis) ke dalam rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
32. Peraturan Bupati Demak Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak;
33. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana kerja adalah sebagai acuan pelaksanaan rencana kerja dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program kegiatan serta pendanaan Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Demak.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi pedoman Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2025;
2. Menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3. Mendorong dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Perhubungan antar bidang dan antar tingkat pemerintahan; Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan terhadap alokasi sumber daya dalam pembangunan bidang Perhubungan;

4. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan serta sebagai bahan evaluasi kegiatan.

1.4. Analisis Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan

1. Tugas dan Fungsi OPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak. Adapun tugas dan pokok fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Demak sesuai dengan penjabaran Peraturan Bupati Demak sebagai berikut:

1) Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.

2) Fungsi

Dinas Perhubungan mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Secara singkat Dinas Perhubungan Kabupaten Demak mempunyai mandat yang harus dipertanggungjawabkan berkaitan dengan Pembangunan Bidang Perhubungan yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan perhubungan untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dalam pemerataan pembangunan;

2. Meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada ruas jalan yang tersebar di Kabupaten Demak;
3. Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan;
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Dinas Perhubungan yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak. Adapun tugas dan pokok fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, berkaitan dengan hal tersebut, uraian tugas antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, kepala dinas perhubungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan dinas, Sekretariat dalam menjalankan tugas pokok mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan dinas;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas dengan susunan organisasi Sekretariat terdapat 2 (dua) Subbag Program dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas merupakan unsur pelaksana di bidang lalu lintas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas angkutan jalan, serta pengawasan dan pengendalian operasional. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan tugas Bidang Lalu Lintas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian operasional; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi bidang lalu lintas sesuai dengan fungsi diatas terdapat 2 (dua) seksi yaitu seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas, seksi pengawasan dan pengendalian operasional serta bidang lalu lintas dibantu pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh sub koordinator.

4. Bidang Angkutan Jalan

Bidang Angkutan Jalan merupakan unsur pelaksana di Bidang Angkutan Jalan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Bidang Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan kegiatan angkutan, prasarana jalan, dan pengujian kendaraan bermotor. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam

pelaksanaan tugas Bidang Angkutan Jalan melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana jalan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian kendaraan bermotor; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

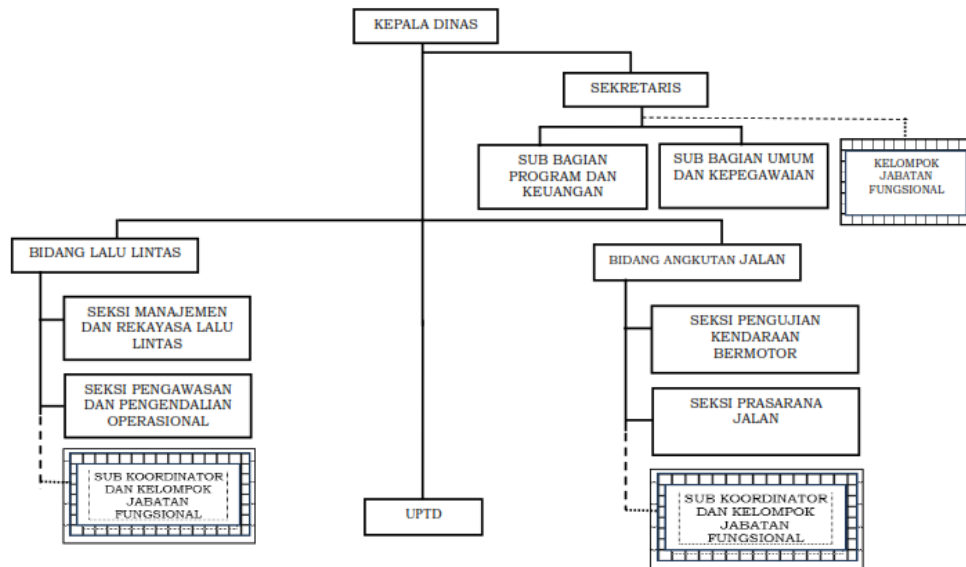
Susunan organisasi Bidang Angkutan Jalan sesuai dengan fungsi diatas terdapat 2 (dua) seksi diantaranya Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Seksi Prasarana Jalan serta Bidang Angkutan Jalan dibantu Pejabat Fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator. Disamping itu, pada Bidang Angkutan terdapat 2 (dua) pelayanan yaitu Pengujian Kendaraan Bermotor dan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).

5. UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan

UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan merupakan unsur pelaksana teknis Bidang Parkir dan Terminal, yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas. UPTD dipimpin oleh Ketua UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan serta terdapat 1 (satu) seksi, Subbag TU UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan. Berkaitan dengan pelayanan, pada UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan terdapat pelayanan berupa perizinan pendirian tempat parkir dan penyeteran PAD dari juru parkir.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak sebagai berikut:



Gambar 2.1. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

3. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan

Guna melaksanakan urusan administrasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak didukung oleh sumber daya manusia sebagai mana tercantum pada table dibawah ini:

Tabel 1.1
SDM Menurut Golongan

NO	UNIT / BIDANG	GOL I			GOL II			GOL III			GOL IV			JUMLAH ORANG		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	-	1	-	1	1	4	5	1	-	1	4	4	8

NO	UNIT / BIDANG	GOL I			GOL II			GOL III			GOL IV			JUMLAH ORANG		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
3	Bidang Angkutan Jalan	-	-	-	1	2	3	2	3	5	-	-	-	3	5	8
4	Bidang Lalu Lintas	-	-	-	6	-	6	1	-	1	2	-	2	9	-	9
5	UPTD Sarpras	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	2	-	2
	Jumlah	-	-	-	9	2	11	6	7	12	4	-	4	19	9	28

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Tabel 1.2.
SDM Menurut Eselon

NO	ESELON	JUMLAH		
		L	P	Jumlah
1	Eselon II b	1	-	1
2	Eselon IIIa	1	-	1
3	Eselon IIIb	1	-	1
4	Eselon IV a	2	2	4
5	Eslon IV b	1	-	1
	Jumlah	6	2	8

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Tabel 1.3.
SDM Menurut Pendidikan Formal

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S2)	5	-	5
2	Sarjana S1	3	6	9
3	Sarjana Muda (D2 dan D3)	1	4	5

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	9	1	10
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	-	-	-
6	Sekolah Dasar (SD)	-	-	-
	Jumlah	18	11	29

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Tabel 1.4.
SDM Menurut Pangkat/ Golongan

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Pendidikan	Pangkat Gol	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional / umum
1	ARIEF SUDARYANTO, S.Sos, M.Si NIP. 19700518 199001 1 001	Kepala Dinas Perhubungan	S-2	IV/c	V	
2	SUGIHARTO, SP, M.Si NIP. 19691122 199603 1 002	Sekretaris & Plt. Kabid Angkutan	S-2	IV/b	V	
3	Drs.MUHAMAD AKHOLIQ, M.Si. NIP. 19690708 199101 1 002	Kabid Lalu Lintas	S-2	IV/a	V	
4	SUNOTO, SE, M.Si NIP. 19740607 199803 1 004	Kasi Wasdalops & Plt. Kasi manajemen Rekayasa Lalu Lintas	S-2	IV/a	V	
5	KHAMDAN, S.Sos NIP. 19670908 199803 1 005	Analisis Kebijakan Ahli Muda & Sebagai Sub Koordinator Keselamatan LLAJ	S-I	III/d		V
6	PURBO JATMIKO, S.Kom.,MM NIP. 19790909 201212 1 001	Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor	S-2	III/c		V
7	SOLEKUL HADI, S.Sos. NIP. 19690301 199103 1 004	Plt. Kepala UPTD Sarpas Perhubungan & Kasubag TU UPTD Sarpras Perhubungan	S-I	III/d		V
8	RUDY SARWONO NIP. 19700412 199203 1 003	Pengemudi	SMA	III/b		V

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Pendidikan	Pangkat Gol	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional / umum
9	SRI UTAMI, S.H NIP. 19760201 200701 2 008	Pelaksana Pengawas dan Pembinaan Angkutan Pada Sub Koordinator Angkutan	S-I	III/b		V
10	EKO ALFIANTO NIP. 19781109 199803 1 004	Pelaksana Administrasi Umum Pada seksi Wasdalops	STM Pembangunan	III/b		V
11	HERLINA OLIVIA EKANINGDIAH, S.Tra NIP. 19870706 200903 2 003	Plt. Kasubbag UMPEG & Pelaksana Pengelola Data Seksi Managemen Rekayasa Lalu Lintas	S-I	III/b		V
12	AYU HESTININGTYAS AGUSTYA PUTRI, S.Tra NIP. 19880820 201101 2 002	Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor	S-1	III/b		V
13	HANIK TRI PRIHATININGSIH NIP. 19731101 200701 2 009	Pelaksana Pengelola Keuangan Pada Subbag Keuangan	SMEA	III/a		V
14	YULIA BUDI ANGGRAENI, S.T. NIP. 19870719 200903 2 003	Penyusun Rencana Pengujian pada Seksi PKB	S-1	III/a		V
15	MARLINA YUGA PRAMESTI, S.ST NIP. 19950816 202012 2 020	Pelaksana Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pada Subbag Program Keuangan	S-I	III/a		V
16	KUSNADI NIP. 19690522 200701 1 007	Pelaksana Pengadministrasi Umum Pada UPTD Sarpas Perhubungan	SLTA	II/d		V
17	SUGITO NIP. 19660904 2007101 1 009	Pengemudi Crane Pada Sub Koordinator Keselamatan LLAJ	SLTA	II/b		V

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Pendidikan	Pangkat Gol	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional / umum
18	SUNARDI NIP. 19690922 200701 1 004	Pengemudi Crane Pada Sub Koordinator Keselamatan LLAJ	SLTA	II/c		V
19	IMRON MASHUDI NIP. 19701019 201212 1 001	Pelaksana Pengadministrasi PKB Pada Seksi PKB	SMA	II/c		V
20	MUHAMMAD ARIFIN NIP. 19720612 200701 1 022	Pengemudi Crane Pada Sub Koordinator Keselamatan LLAJ	SLTA	II/b		V
21	R. PRASETYO DWI A.P. NIP. 19840327 201212 1 003	Pelaksana Tehnisi Survey Lalulintas Jalan Pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas	SMA	II/c		V
22	SUBANDI NIP. 19680405 200701 1 027	Pengemudi Crane Pada Sub Koordinator Keselamatan LLAJ	SLTA	II/a		V
23	AKHMAD MAJID, A. Md. NIPPPK. 19890405 202321 1 031	Pranata Komputer Terampil	D-III	VII		V
24	DIAH PUSPITANINGRUM, A.Md. PKB NIPPPK. 19940504 202321 2 039	Penguji Kendaraan Bermotor	D-III	VII		V
25	DIAN DWI LESTARI, A.Md. PKB NIPPPK. 19980326 202321 2 014	Penguji Kendaraan Bermotor	D-III	VII		V
26	REZANI NURMANINGTYAS, S.T NIPPPK. 19930320 202421 2 024	Pranta Komputer Terampil	S1	IX		V
27	SAMSUL HIDAYAT, S.Kom NIPPPK. 19940510 202421 1 018	Pranta Komputer Terampil	S1	IX		V
28	MARTA LISTIANAH, A.Ma. NIPPPK. 19910304 202421 2 031	Penguji Kendaraan Bermotor	D - II	VI		V
29	RAHAYU LASIASARI JAYANI, A.ma.PKB NIPPPK. 19970531 202421 2 024	Penguji Kendaraan Bermotor	D - II	VI		V
Jumlah					4	25
Jumlah Total					29	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Tabel 1.5.
SDM Non ASN Menurut Pendidikan Formal

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S2)	-	-	-
2	Sarjana S1	5	3	8
3	Diploma IV	2	1	3
4	Diploma III	2	1	3
5	Diploma II	-	-	-
6	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	24	6	30
7	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	2	-	2
8	Sekolah Dasar (SD)	-	-	-
	Jumlah	40	13	46

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Tabel 1.6.
SDM Tenaga Teknis (Pegawai Tidak Tetap) Menurut Pendidikan

NO	NAMA	TINGKAT PENDIDIKAN
1	AHMAD SHOLEH, S.Pd	S.1
2	AINUL LATIFAH, S.Ak	S.1
3	NOR FAIZAH, SH	S.1
4	HANY FA'IZIN, S.ST	D-IV
5	RIZKI MAULIA FATAH, S.ST	D-IV
6	BAEHAQI HASBIYANSYAH, S.ST	D-IV
7	IVONNY AYU RAHMAWATI, A.Md. LLAJ	D-III

NO	NAMA	TINGKAT PENDIDIKAN
8	HERI SUSANTO, A.Md	D-III
9	BENNY KINTOKO	SLTA / Sederajat
10	NUR ASİYATUL AMNA	SLTA / Sederajat
11	SUHADI	SLTA / Sederajat
12	DWIYANTO	SLTA / Sederajat
13	SUNARYO	SLTA / Sederajat
14	DAVID INDRIASMAN	S1
15	DISKI ARIZAL	SLTA / Sederajat
16	EKA SATRIYA PERDANA	SLTA / Sederajat
17	BAYU HERLAMBAH	SLTA / Sederajat
18	M. ALFIAN QORRY IFADA	S1
19	SYARIFAH SAUDAH	SLTA / Sederajat
20	RIAN GALIH SAMODRO	SLTA / Sederajat
21	GALANG HERU VIRGIWAN	SLTA / Sederajat
22	ARIATUN	SLTA / Sederajat
23	SENO PRASETYO ADI WIBOWO	S1
24	BAGUS ISMARYANTO	SLTA / Sederajat
25	HADI IRAWAN	SLTA / Sederajat
26	HARSONO	SLTA / Sederajat
27	MUHAMMAD ARIF HIDAYAT	SLTA / Sederajat
28	MUHAMMAD YULIANTO	SLTA / Sederajat
29	M. EKO JUARSO	S1
30	ACHMAD FARIQ ZAINUL CHAQ	SLTA / Sederajat
31	DJAKA CIPUTRA LAKSANA	SLTA / Sederajat

NO	NAMA	TINGKAT PENDIDIKAN
32	AGUNG DWI SUSANTO	SLTA / Sederajat
33	GATOT RAGIL SAPUTRO	SLTA / Sederajat
34	IMAM SUJONO	SLTP / Sederajat
35	SAIKUN	SLTP / Sederajat
36	ADI KUSVIANTO	SLTA / Sederajat
37	WINDY CAKTI WIRATAMA	SLTA / Sederajat
38	DINDA AYU LESTARI	SLTA / Sederajat
39	MOH ALFIN KURNIA FAHRI	SLTA / Sederajat
40	MOH. ARDIANSYAH NIKO SAPUTRO	SLTA / Sederajat
41	ARYA AJI SIDDHIQ	SLTA / Sederajat
42	SA'DATUL LAILIYAH	S1
43	ANGGITA KUSUMASTUTI	SLTA / Sederajat
44	RINA IMAS SURYANTI	SLTA / Sederajat
45	AHMAD FAUZI ADI SAPUTRA , A.md.PKB	D-III
46	MOHAMMAD SAIFUL YUSUF	SLTA / Sederajat

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Tabel 1.7.

SDM Menurut Bidang Transportasi

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
1	S1/ D-IV Transportasi	2	3	5
2	D-III Transportasi	1	1	2
3	D-III Pengujian Kendaraan Bermotor	1	2	3
4	D-II Pengujian Kendaraan Bermotor	-	3	3

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
	Jumlah	4	9	13

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

1.5. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2025 disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika Renja PD;

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Menguraikan tentang kondisi pelayanan Dinas Perhubungan. Bab ini juga menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja 2023;

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan;

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2025 beserta kerangka pendanaannya;

BAB V Penutup

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

Adapun uraian capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target kinerja dalam perjanjian kinerja. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 Dinas Perhubungan memiliki 2 Program dan 16 Kegiatan serta 30 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp. 32.493.631.400,00,- dan terealisasi Rp. 32.239.454.617,00,- atau 99,22%, pada pelaksanaan tahun anggaran 2022 terdapat 2 Program, 15 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp. 30.604.424.178,00,- realisasi keuangan sebesar Rp. 29.766.554.415,00,- atau 97,26%, dan pada pelaksanaan tahun anggaran 2021 terdapat 2 Program, 15 kegiatan dan 48 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp. 30.417.067.136,00,- realisasi keuangan sebesar Rp. 29.638.048.528,00,- atau 97,44%.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada setiap tahun anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Demak pagu anggaran semakin

meningkat, sedangkan untuk capaian dan realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2023 sebesar 99,22%, disusul tahun 2021 sebesar 97,44% dan yang terakhir tahun 2022 sebesar 97,26%. Dengan adanya peningkatan capaian realisasi tersebut, terdapat peran yang sangat penting antar seksi dan bidang dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan perencanaan yang sangat matang dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang terdapat pada rencana anggaran. Adapun Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 serta perbandingan capaian dan realisasi tahun 2021 dan 2023, serta realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah, secara rinci sebagai berikut:

1. Program Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini pada tahun anggaran 2023 mempunyai target 89,30%, alokasi anggaran sebesar Rp 27.159.511.400,00 dan realisasi keuangan Rp 26.955.505.901,00 (99,25%). Program ini memiliki 1 (satu) indikator persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat yang ditindaklanjuti, yaitu persentase ketersediaan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah selama 12 bulan dengan target 89,30% terealisasi 99,25%, atau mencapai 100%.

Berdasarkan tahun anggaran 2022 Program ini mempunyai target 80%, alokasi anggaran sebesar Rp 25.344.924.178,00 dan realisasi keuangan Rp 24.524.895.048,00 (96,76%). Program ini memiliki 1 (satu) indikator persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat yang ditindaklanjuti, yaitu persentase

ketersediaan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah selama 12 bulan dengan target 80% terealisasi 98,82%, atau mencapai 100%.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2023 sebesar 100% disebabkan komitmen bersama Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Sub Koordinator Dinas Perhubungan Kabupaten Demak terkait dengan *time schedule* pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2023.

Meskipun target tercapai, namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja, diantaranya adalah Pemerintah mengeluarkan Peraturan terkait dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang dimana inti dari Peraturan tersebut Lembaga, Kementerian dan Pemerintah Kota/ Kabupaten dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa diharuskan mempunyai persentase Produk Dalam Negeri (PDN) yang menyebabkan keterlambatan pengadaan barang/ jasa, serta pada tahun 2023 dalam pelaksanaan terutama kegiatan rutin kantor baik itu pengadaan dan pemeliharaan menggunakan *E – Catalogue* dimana dalam pengadaan dan pemeliharaan terpusat pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Demak sehingga membutuhkan waktu dalam pengusulan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, strategi yang digunakan guna mengurangi hambatan di masa mendatang adalah mempertahankan komitmen dan lebih mengutamakan persentase Produk Dalam Negeri (PDN) dan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa serta berkoordinasi terkait dengan pengadaan dan pemeliharaan

yang nantinya akan di ajukan guna pembelian melalui *E – Catalogue* dengan Pejabat Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Demak serta dalam perencanaan tahun yang akan mendatang dalam pengadaan dan pemeliharaan yang melalui *E – Catalogue* segera dilakukan mengingat prosedur system yang mempunyai tahapan – tahapan sehingga dalam pelaksanaanya sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sejumlah 6 (enam) Kegiatan dengan 6 Indikator antara lain Kegiatan:

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran tahun 2022 Sebesar Rp. 4.837.102.361,00 dengan realisasi pelaksanaan sebesar 4.194.688.870,00 atau mencapai 86,72%, sedangkan Alokasi Anggaran tahun 2023 Rp 4.265.674.400,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 4.150.118.473,00 atau mencapai 97,29%. Berkaitan dengan pagu anggaran pada tahun 2022 lebih besar dari tahun 2023, hanya saja dalam realisasi capaian pada tahun 2022 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2023, dengan adanya peningkatan realisasi ini tidak lepas dengan adanya perencanaan yang matang sesuai dengan kebutuhan yang ada pada Dinas Perhubungan. Sehubungan dengan itu dalam pelaksanaan kegiatan ini memiliki indikator kinerja jumlah laporan keuangan dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100% pada tahun 2023.

Sehubungan dengan adanya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat

inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi anggaran tahun 2022 Rp. 168.580.000,00 dengan realisasai pelaksanaan Rp. 166.990.220,00 atau mencapai 99,06%, sedangkan alokasi anggaran tahun 2023 Rp 207.935.674,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 204.722.126,00 atau mencapai 98,45%. Beraiktan dengan adanya peningkatan pagu anggaran yang dimana pada tahun 2023 Dinas Perhubungan telah melaksanakan *capacity building*, sedangkan pada tahun 2022 hanya fokus dalam pelaksanaan diklat pegawai yang berkaitan dengan Bidang Perhubungan. Dengan adanya peningkatan realisasi pelaksanaan ini tidak lepas dengan adanya perencanaan yang matang sesuai dengan kebutuhan yang ada pada Dinas Perhubungan. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja administrasi kepegawaian yang terpenuhi dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100% pada tahun 2023.

Sehubungan dengan adanya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan penyerapan

anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa Peningkatan disiplin pegawai dengan mengadakan *capacity building* agar membangun ketrampilan (*skills*) dan kemampuan (*capabilities*), seperti kepemimpinan, manajemen, keuangan dan pencarian dana, program dan evaluasi, supaya pembangunan organisasi efektif dan berkelanjutan seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran tahun 2022 Rp. 278.169.865,00 realisasi pelaksanaan Rp. 266.865.335,00 atau mencapai 95,94%, sedangkan alokasi anggaran tahun 2023 Rp 267.120.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 264.344.652,00 atau mencapai 98,96%. Berkaitan dengan pagu anggaran pada tahun 2022 lebih besar dari tahun 2023, hanya saja dalam realisasi capaian pada tahun 2022 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2023, dengan adanya peningkatan realisasi ini tidak lepas dengan adanya perencanaan yang matang sesuai dengan kebutuhan yang ada pada Dinas Perhubungan. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja administrasi umum yang terpenuhi dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100% pada tahun 2023.

Sehubungan dengan adanya kegiatan administrasi umum perangkat daerah, dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/hambatan pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa

penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga kantor, penyediaan barang cetak dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran tahun 2022 Rp. 8.000.000,00 realisasi pelaksanaan 7.800.000,00 atau mencapai 97,50%, sedangkan alokasi anggaran tahun 2023 Rp 121.100.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 119.300.000,00 atau mencapai 98,51%. Berkaitan dengan adanya perbandingan anggaran yang jauh lebih besar tersebut, pada tahun anggaran 2023 melakukan pengadaan berupa *running text* yang ditempatkan pada *traffic light* dan barang lainnya guna menunjang kegiatan efektif, efisien Dinas Perhubungan serta memberikan informasi kepada pengguna jalan berkaitan dengan keselamatan bertransportasi.

Kegiatan ini memiliki indikator jumlah barang milik daerah yang disediakan dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100% pada tahun 2023. Sehubungan dengan adanya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa pengadaan barang milik daerah berupa *fingger print* dan pengadaan papan informasi elektronik yang

ditempatkan pada simpang SMP N 1 Demak dan simpang Bogorame yang akan dimanfaatkan penunjang kinerja pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran tahun 2022 Rp. 19.599.462.902,00 realisasi anggaran Rp. 19.447.681.023,00 atau mencapai 99,23%, sedangkan alokasi anggaran tahun 2023 Rp 21.760.280.134,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 21.683.266.630,00 atau mencapai 99,65%. Sehubungan dengan adanya kebutuhan langganan listrik yang semakin meningkat lebih besar daari tahun 2022 terutama listrik penerangan jalan umum dikarenakan setiap tahunnya dinas perhubungan berupaya melakukan penambahan titik pemasangan penerangan jalan umum, sehingga kebutuhan langganan listrik pun semakin besar.

Berkaitan hal tersebut, capaian realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2023 lebih besar dari tahun 2022, dengan adanya peningkatan realisasi ini tidak lepas dengan adanya perencanaan yang matang sesuai dengan kebutuhan serta penguatan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik yang ada pada Dinas Perhubungan.

Kegiatan ini memiliki indikator jasa penunjang urusan yang tersedia dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Sehubungan dengan adanya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat

inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa penyediaan jasa surat menyurat yang ditujukan kepada lembaga, kementerian, pemerintah kota/ kabupaten, dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk menunjang kegiatan pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran tahun 2022 Rp 453.609.050,00 realisasi anggaran Rp. 440.689.600,00 atau sebesar 97,15%, sedangkan alokasi Anggaran tahun 2023 Rp. 537.401.192,00 realisasi pelaksanaan Rp 533.754.020,00 atau mencapai 99,32%. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan kegiatan tahun demi tahun telah dilakukan perencanaan yang matang, mengevaluasi, inovasi, strategi dan kinerja sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan evolusi perubahan dinamika kebutuhan yang berubah ubah guna mencapai realisasi yang sesuai, pada tahun 2023 dapat dilihat adanya peningkatan pagu dan realisasi yang telah tercapai serta penguatan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

Kegiatan ini memiliki indikator jumlah BMD yang terpelihara dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Sehubungan dengan adanya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian tersebut

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa pemeliharaan barang milik daerah terutama barang berupa gedung, kendaraan dan peralatan mesin lainnya seperti penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya serta pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Alokasi Anggaran tahun anggaran 2022 Rp. 5.259.500.000,00 dan realisasi keuangan Rp 5.227.634.367,00 (99,39%). Program ini memiliki 1 indikator Kinerja Program dengan tingkat capaian sangat tinggi, yaitu Persentase transportasi dan perhubungan darat terlayani realisasi 100% dari target 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

Berdasarkan perbandingan alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 5.334.120.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 5.283.948.716,00 (99,06%) dalam pelaksanaannya program ini mempunyai program ini memiliki 1 indikator kinerja program dengan tingkat capaian sangat tinggi, yaitu persentase transportasi dan perhubungan darat terlayani realisasi 100% dari target 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

Berkaitan dengan perbandingan alokasi anggaran tahun 2023 mengalami peningkatan anggaran sebesar 1,5% dibandingkan dengan tahun anggaran 2022, hal tersebut digunakan sebagai peningkatan infrastruktur, peningkatan keselamatan, keamanan transportasi, pengembangan transportasi berkelanjutan serta peningkatan pelayanan

publik transportasi.

Keberhasilan pencapaian target kinerja tahun 2022 dan 2023 sebesar 100% disebabkan dilakukan perencanaan yang matang, pelaksanaan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, mengevaluasi, inovasi, strategi dan kinerja sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan evolusi perubahan dinamika kebutuhan yang berubah ubah guna mencapai realisasi yang sesuai, serta penguatan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

Berkaitan dengan tercapainya target, namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja, diantaranya adalah dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang mengharuskan Lembaga, Kementerian, Pemerintah Kota/ Kabupaten untuk pengadaan barang harus dilengkapi dengan nilai Produk Dalam Negeri (PDN) kurang lebih 30%. Serta pada tahun 2023 dalam pelaksanaan terutama kegiatan rutin kantor baik itu pengadaan dan pemeliharaan menggunakan *E – Catalogue* dimana dalam pengadaan dan pemeliharaan terpusat pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Demak sehingga membutuhkan waktu dalam pengusulan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak mengalami hambatan dalam melaksanakan pengadaan barang/ jasa yang mengharuskan dalam pengadaan dilengkapi dengan nilai Produk Dalam Negeri (PDN), dimana masih banyaknya penyedia jasa yang belum mendaftarkan produk tersebut pada Kementerian Perindustrian serta pada tahun 2022 dan 2023.

Strategi yang digunakan guna mengurangi hambatan di masa mendatang adalah perhitungan kandungan persentase Produk Dalam Negeri (PDN) pengadaan barang/ jasa harus

ditangani lebih awal, agar dalam pelaksanaan kegiatan nantinya berjalan sesuai dengan *Time Schedule* dan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa serta berkoordinasi terkait dengan pengadaan dan pemeliharaan yang nantinya akan di ajukan guna pembelian melalui *E – Catalogue* dengan Pejabat Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Demak serta dalam perencanaan tahun yang akan mendatang dalam pengadaan dan pemeliharaan yang melalui *E – Catalogue* segera dilakukan mengingat prosedur system yang mempunyai tahapan – tahapan sehingga dalam pelaksanaanya sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Manfaat Penyelenggaraan program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu meningkatkan transportasi yang berkelanjutan, konektivitas, efektif, aman, nyaman, dan selamat.

Kegiatan yang mendukung program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sejumlah 10 (sepuluh) kegiatan dengan 9 (sembilan) indikator antara lain:

1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota

Alokasi Anggaran tahun 2022 Rp 20.000.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 19.854.000,00 atau mencapai serapan 99,27%. Berkaitan dengan alokasi anggaran tahun 2023 Rp. 15.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 15.000.000,00 atau mencapai 100%. Perbedaan yang lumayan signifikan terdapat pada pagu anggaran dimana tahun anggaran 2022 dibandingkan 2023 nilai pagu pada kegiatan tersebut lebih besar tahun 2022, setelah melakukan beberapa audit dan evaluasi internal pada tahun 2023 dilakukan penurunan pada kegiatan tersebut guna melakukan beberapa program prioritas guna mendukung kegiatan lain untuk mencapai target.

Dengan adanya pengurangan anggaran tersebut

tidak banyak berimbas pada peningkatan infrastruktur, peningkatan keselamatan, keamanan transportasi, pengembangan transportasi berkelanjutan serta peningkatan pelayanan publik transportasi, kegiatan ini memiliki indikator dokumen pengelolaan jaringan transportasi dan lalu lintas jalan tersedia dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Dengan keberhasilan tersebut pada tahun 2022 dan 2023 disebabkan dilakukan perencanaan yang matang, pelaksanaan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, mengevaluasi, inovasi, strategi dan kinerja sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan evolusi perubahan dinamika kebutuhan yang berubah ubah guna mencapai realisasi yang sesuai, serta penguatan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

Kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/ kota ini mendukung kegiatan indikator kinerja utama pada Dinas Perhubungan, sehubungan dengan adanya kegiatan ini output kegiatan adalah kinerja lalu lintas, dimana dalam menentukan kinerja lalu lintas diperlukan survey volume lalu lintas pada seluruh ruas jalan kabupaten/ kota, penentuan persentase kinerja lalu Lintas pada tahun 2022 sebesar 0,21 dan 2023 sebesar 0,22. Berdasarkan hasil kinerja lalu lintas semakin mendekati 0 semakin baik kinerja lalu lintas, sedangkan semakin mendekati 1 maka semakin buruk kinerja lalu lintas, dengan hasil pada tahun 2022 dan 2023 Kabupaten Demak masuk dalam kategori baik kinerja lalu lintas.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota Sumber Daya Manusia (SDM)/

personil yang terbatas untuk melaksanakan survey lalu lintas pada ruas jalan kabupaten yang sudah ditentukan, serta peralatan yang digunakan sudah mengalami penyusutan fungsi. Upaya mengatasinya menurunkan semua sumber daya manusia (sdm)/ personil yang berapa pada seksi tersebut untuk melaksanakan survey lalu lintas agar mempunyai hasil yang efektif, dan menggunakan peralatan yang seadanya.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa survey identifikasi timbulnya tarikan dan bangkitan transportasi pada suatu ruas jalan Kabupaten yang nantinya akan dijadikan sebagai data dukung kajian terkait dengan pertumbuhan dan simpul transportasi pada suatu daerah/ ruas jalan, yang mana akan menjadi pertumbuhan ekonomi dan memudahkan konektivitas pengguna jalan yang akan melalui khususnya angkutan umum.

2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran tahun 2022 Rp 4.165.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 3.778.057.447,00 atau mencapai serapan 99,35%, sedangkan alokasi anggaran tahun 2023 Rp 3.804.500.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 3.774.420.500,00 atau mencapai 99,21%. Kegiatan ini memiliki indikator Persentase sarana perlengkapan dalam kondisi baik dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Dengan keberhasilan tersebut pada tahun 2022 dan 2023 disebabkan dilakukan perencanaan yang matang, pelaksanaan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, mengevaluasi, inovasi, strategi dan kinerja sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan evolusi perubahan dinamika kebutuhan yang berubah ubah guna mencapai realisasi yang sesuai, serta penguatan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

Sehubungan dengan alokasi anggaran dimana tahun 2023 mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan pada tahun anggaran 2022 terdapat anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 500.000.000,00 yang digunakan untuk Pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum ruas jalan Jragung, sedangkan pada tahun 2023 tidak mendapatkan bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah.

Pemasangan penerangan jalan umum pada tahun 2022 sebagai berikut:

- a) Pengadaan lampu LED Rp. 1.000.000.000,00;
- b) Pengadaan dan pemasangan marka jalan Rp. 199.950.000,00;
- c) Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan ruas jalan Tembiring Rp. 200.000.000,00;
- d) Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan ruas jalan Mijen – Pasir Rp. 891.000.000,00 (musren);
- e) Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan ruas jalan Jragung Rp. 500.000.000,00 (bangub);
- f) Pengadaan dan pemasangan *warning light* Rp. 80.000.000,00;
- g) Belanja pemeliharaan material penerangan jalan Rp. 900.005.948,00.

Berkaitan dengan hal diatas, terdapat 3 (tiga) Paket pemasangan lampu penerangan jalan, 3 (tiga) paket pemasangan perlengkapan jalan, 1 (satu) paket belanja

lampe led penerangan jalan dan 1 (satu) paket belanja pemeliharaan material penerangan jalan.

Pengadaan dan pemasangan penerangan jalan pada tahun anggaran 2023 yaitu:

- a) Pengadaan dan pemasangann LPJU Ruas Jalan BTS. Kota Demak Trengguli – BTS. Kota Kudus Rp. 750.000.000,00;
- b) Pengandan lampu LED Rp.1.250.000.000,00;
- c) Belanja pemeliharaan material penerangan jalan Rp. 450.000.000,00;
- d) Belanja modal jaringan listrik lainnya (Meterisasi PJU) Rp. 115.000.000,00;
- e) Pengadaan dan pemasangan LPJU Ruas Jalan Botoseman – Balairejo – Luwuk (Musren) Rp. 420.000.000,00;
- f) Pengadaan dan pemasangan LPJU Ruas Jalan Pecuk (Mijen – Pasir) (Musren) Rp. 250.000.000,00;
- g) Pengadaan dan pemasangan CCTV jalan Rp. 100.000.000,00.

Terdapat 4 (empat) paket pemasangan lampu penerangan jalan, 1 (satu) paket pemeliharaan material penerangan jalan, 1 (satu) paket pengadaan lampu LED, dan 1 (satu) paket pemasangan CCTV jalan Rp. 100.000.000,00.

Sehubungan dengan pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan diatas, terdapat beberapa peningkatan 2022 dan 2023, hal tersebut dalam pelaksanaan kegiatan dilakukanya audit dan evaluasi sebagai peningkatan infrastruktur, peningkatan keselamatan, keamanan transportasi, pengembangan transportasi berkelanjutan serta peningkatan pelayanan publik transportasi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan

kabupaten/kota terkait dengan pengadaan barang dan jasa dimana pemerintah mengeluarkan peraturan terkait dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang dimana inti dari Peraturan tersebut Lembaga, Kementerian dan Pemerintah Kota/ Kabupaten dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa diharuskan mempunyai persentase Produk Dalam Negeri (PDN) yang menyebabkan keterlambatan pengadaan barang/ jasa dikarenakan masih ditemukan beberapa Barang tidak mengandung TKDN.

Upaya mengatasi dalam pembuatan rencana anggaran biaya pengadaan barang/ jasa dilengkapi dengan persentase nilai Produk Dalam Negeri (PDN) yang dikeluarkan pada website Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Serta dalam pengadaan ini Dinas Perhubungan Kabupaten Demak telah berupaya untuk menggunakan *e-catalogue* dalam pengadaan barang terutama alat penerangan jalan.

3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Alokasi anggaran tahun 2022 tidak terdapat subkegiatan tersebut, kegiatan rehabilitasi sudah di masukkan pada subkegiatan penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/ Kota, sedangkan alokasi anggaran tahun 2023 Rp 150.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 148.595.300,00 atau mencapai 99,06%. Kegiatan ini memiliki indikator jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Keberhasilan tahun 2023 disebabkan dilakukan perencanaan yang matang, pelaksanaan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, mengevaluasi, inovasi, strategi dan kinerja sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan evolusi

perubahan dinamika kebutuhan yang berubah ubah guna mencapai realisasi yang sesuai, serta penguatan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

Dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat audit, evaluasi, inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, terdapat 2 kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- a) Pemeliharaan CCTV Jalan Rp. 70.000.000,00;
- b) Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light Rp. 80.000.000,00.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota terkait dengan pengadaan barang dan jasa dimana pemerintah mengeluarkan peraturan terkait dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang dimana inti dari Peraturan tersebut Lembaga, Kementerian dan Pemerintah Kota/ Kabupaten dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa diharuskan mempunyai persentase Produk Dalam Negeri (PDN) yang menyebabkan keterlambatan pengadaan barang/ jasa dikarenakan masih ditemukan beberapa Barang tidak mengandung TKDN.

Upaya mengatasi dalam pembuatan rencana anggaran biaya pengadaan barang/ jasa dilengkapi dengan persentase nilai Produk Dalam Negeri (PDN) yang dikeluarkan pada website Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Serta dalam pengadaan ini Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

telah berupaya untuk menggunakan *E-Catalogue* dalam pengadaan barang.

4) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Alokasi anggaran tahun 2022 pada kegiatan pengelolaan terminal penumpang tipe C tidak dialokasikan, sedangkan alokasi anggaran tahun 2023 Rp 120.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 119.204.800,00 atau mencapai 99,34%. Kegiatan ini memiliki indikator jumlah penerbitan izin dan fasilitas parkir terlaksana dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Keberhasilan tahun 2023 disebabkan dilakukan perencanaan yang matang, pelaksanaan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, mengevaluasi, inovasi, strategi dan kinerja sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan evolusi perubahan dinamika kebutuhan yang berubah ubah guna mencapai realisasi yang sesuai, serta penguatan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

Sehubungan dengan adanya kegiatan pengelolaan terminal penumpang tipe C, dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa pengelolaan terminal penumpang tipe C adalah pembangunan terminal tipe C yang berada pada

kecamatan Mranggen Desa Batursari, dengan begitu nantinya mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan antar moda angkutan sehingga dapat membangkitkan suatu wilayah tersebut serta meningkatkan perkembangan ekonomi.

5) Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir

Alokasi anggaran tahun 2022 Rp 120.000.000,00 realisasi keuangan sebesar 119.204.800,00 atau serapan mencapai 99,34%. Sedangkan alokasi anggaran tahun 2023 Rp 212.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 208.204.800,00 atau mencapai 98,21%. Kenaikan pagu anggaran tahun 2023 terjadi dikarenakan pada tahun tersebut terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Kajian Transportasi beberapa Kajian Pakir Tepi Jalan, Pasar dan Kawasan Pariwisata.

Kegiatan ini memiliki indikator jumlah penerbitan izin dan fasilitas parkir terlaksana dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Keberhasilan tahun 2022 dan 2023 disebabkan dilakukan perencanaan yang matang, pelaksanaan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, mengevaluasi, inovasi, strategi dan kinerja sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan evolusi perubahan dinamika kebutuhan yang berubah ubah guna mencapai realisasi yang sesuai, serta penguatan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

Sehubungan dengan adanya kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan pada kegiatan

tersebut. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang nantinya akan meningkatkan PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

6) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Alokasi anggaran tahun 2022 Rp 274.000.000,00 realisasi keuangan Rp 273.559.270,00 serapa mencapai 99,84%, seangkan alokasi anggaran tahun 2023 Rp 227.420.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 225.987.966,00 atau mencapai 99,37%. Penurunan pagu tahun 2023 ini disebabkan adanya pengujian kendaraan bermotor yang dibebankan pada anggaran kegiatan tersebut, sedangkan pada tahun 2024 pengujian kendaraan bermotor yang dimaksud sudah masuk dalam pendataan BKPP sehingga dimasukkan anggaran Honorer Dinas.

Kegiatan ini memiliki indikator persentase uji KIR angkutan umum dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100% keberhasilan tahun 2022 dan 2023 disebabkan dilakukan perencanaan yang matang, pelaksanaan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, mengevaluasi, inovasi, strategi dan kinerja sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan evolusi perubahan dinamika kebutuhan yang berubah ubah guna mencapai realisasi yang sesuai, serta penguatan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas dan

jangkauan layanan publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

Sehubungan dengan adanya kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor, dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor, penyediaan kartu bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor, dan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa kalibrasi dan pemeliharaan alat uji berupa alat uji rem / *brake tester*, *gas analyzer*, *smoke tester*, *head light tester* dan lain – lain serta pemeliharaan gedung uji yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

7) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan jalan Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran 2022 Rp 45.000.000,00 realisasi keuangan Rp 44.097.600,00 serapan mencapai 97,99% alokasi anggaran Rp 212.570.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 205.784.000,00 atau mencapai 96,81%. Kenaikan pagu anggaran 2023 disebabkan evaluasi dari kegiatan ini termasuk dalam program unggulan dimana ditemukan masih terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target sehingga pada tahun 2023 dilakukan pemenuhan sebagai berikut:

- a) Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas

Rp 77.215.000,00;

- b) Pengadaan dan pemasangan marka jalan Rp 100.000.000,00.

Sedangkan pada tahun 2022, pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas terdapat dalam subkegiatan penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/ Kota berupa marka jalan serta pengadaan mesin *cutting sticker* rambu dan pemasangan rambu lalu lintas.

Kegiatan ini memiliki indikator jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas terlaksana dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Keberhasilan tahun 2022 dan 2023 disebabkan dilakukan perencanaan yang matang, pelaksanaan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, mengevaluasi, inovasi, strategi dan kinerja sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan evolusi perubahan dinamika kebutuhan yang berubah ubah guna mencapai realisasi yang sesuai, serta penguatan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota terkait dengan pengadaan barang dan jasa dimana pemerintah mengeluarkan peraturan terkait dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang dimana inti dari Peraturan tersebut Lembaga, Kementerian dan Pemerintah Kota/ Kabupaten dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa diharuskan mempunyai persentase Produk Dalam Negeri (PDN) yang menyebabkan keterlambatan pengadaan barang/ jasa dikarenakan masih ditemukan beberapa barang tidak mengandung TKDN.

Upaya mengatasi dalam pembuatan rencana anggaran biaya pengadaan barang/ jasa dilengkapi dengan persentase nilai Produk Dalam Negeri (PDN) yang dikeluarkan pada website Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Serta dalam pengadaan ini Dinas Perhubungan Kabupaten Demak telah berupaya untuk menggunakan *e-catalogue* dalam pengadaan barang.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mendukung keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan.

8) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran tahun 2022 Rp 10.000.000,00 realisasi keuangan Rp 8.679.500,00 serapan mencapai 86,80%, sedangkan alokasi anggaran tahun 2023 Rp 7.430.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 7.285.000,00 atau mencapai 98,05%. Penurunan anggaran setelah melakukan evaluasi ditemukan beberapa penyebab dimana pada tahun 2022 pelaksanaan dan penyelenggaraan pemaparan analisis dampak lalu lintas pada ruas jalan kabupaten sedikit sehingga berdampak dalam serapan anggaran, untuk itu pada tahun 2023 pagu anggaran dalam kegiatan pelaksanaan andalalin dilakukan pengurangan untuk mengoptimalkan kegiatan lainnya.

Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah andalalin tersedia (Dengan Satuan/Bulan) dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Keberhasilan tahun 2022 dan 2023 disebabkan dilakukan perencanaan yang matang, pelaksanaan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, mengevaluasi,

inovasi, strategi dan kinerja sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan evolusi perubahan dinamika kebutuhan yang berubah ubah guna mencapai realisasi yang sesuai, serta penguatan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota adalah Andalalin (Analisis Dampak Lalu Lintas) kini telah menjadi bagian yang penting dalam kebijakan pengelolaan kawasan suatu daerah. Andalalin merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten guna mengendalikan dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan terhadap lalu lintas di sekitarnya. Semakin berkembangnya pembangunan baik pembangunan infrastruktur, kawasan perumahan, pusat perbelanjaan (mall), pertokoan serta perhotelan, secara langsung pembangunan ini pasti akan menimbulkan potensi adanya perjalanan tambahan pada saat bangunan tersebut terbangun, sehingga mempunyai pengaruh atau dampak terhadap kondisi lalu lintas di sekitarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan sebagai dinas teknis yang menangani terkait andalalin tersebut, pada tahun 2022 tidak banyak pertumbuhan pengembangan yang berada pada ruas jalan kabupaten, sehingga anggaran yang disediakan tidak terserap dengan maksimal. Upaya mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perhubungan serta Instansi terkait seperti Disputaru dan Kepolisian Kabupaten Demak mengadakan koordinasi bersama mengenai sosialisasi pentingnya andalalin dalam pelaksanaan pembangunan yang menimbulkan

bangkitan dan tarikan transportasi pada daerah terdampak pembangunan tersebut.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa Koordinasi dan Sinkronisasi penilaian dokumen hasil andalalin yang dilaksanakan oleh pihak konsultan terhadap kesesuaian dokumen dan lapangan bersama dengan Dinas Teknis lainnya seperti DINPUTARU dan Kepolisian Kabupaten Demak untuk melakukan evaluasi kegiatan andalalin tersebut.

9) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Alokasi anggaran tahun 2022 Rp 265.500.000,00 realisasi keuangan Rp 265.458.000,00 serapan mencapai 99,98, sedangkan alokasi anggaran tahun 2023 Rp 575.200.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 571.723.000,00 atau mencapai 99,40%. Kenaikan pagu anggaran 2023 disebabkan adanya beberapa kegiatan yang mendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, dimana pada tahun yang sama *Flyover* Ganefo sudah beroperasi sehingga pada bawah *Flyover* tersebut terdapat perlintasan sebidang yang menghubungkan antar ruas jalan kabupaten sehingga pada perlintasan tersebut di bangun POS perlintasan kereta api dan memberikan honor kepada petugas perlintasan yang dibebankan pada kegiatan tersebut serta pada tahun 2023 Kabupaten Demak melalui Dinas Perhubungan mengadakan kegiatan Bus Mudik Gratis kepada Masyarakat Demak yang berada di Jabodetabek.

Kegiatan ini memiliki indikator jumlah audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan tersedia dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Keberhasilan tahun 2022 dan 2023 disebabkan dilakukan perencanaan yang matang, pelaksanaan koordinasi dengan *stakeholder* terkait,

mengevaluasi, inovasi, strategi dan kinerja sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan evolusi perubahan dinamika kebutuhan yang berubah ubah guna mencapai realisasi yang sesuai, serta penguatan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

Sehubungan dengan adanya kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan, dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal, serta pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum, pengadaan gason, rambu portable, *traffic cone*, serta dalam kegiatan ini terdapat pembangunan pos jaga perlintasan sebidang yang berkasi di Genefo Kecamatan Mranggen.

10) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran tahun 2022 Rp 30.000.000,00 realisasi keuangan Rp 29.998.750,00 serapan mencapai 100%, sedangkan alokasi anggaran tahun 2023 Rp 22.800.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 19.680.000,00 atau mencapai 86,32%. Penurunan pagu anggaran dan serapan tahun 2023 disebabkan adanya kesalahan perencanaan sehingga alokasi dana tidak terserap secara maksimal.

Sehubungan dengan adanya kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan ada permasalahan/ hambatan pada kegiatan tersebut berupa perencanaan yang kurang matang sehingga dalam pelaksanaan kegiatan alokasi anggaran tidak terserap dengan maksimal. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

11) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran tahun 2022 Rp 330.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 323.875.000,00 atau mencapai 98,14%. Sedangkan alokasi anggaran tahun 2023 Rp 57.200.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 56.924.450,00 atau mencapai 99,52%. Terdapat penurunan pada tahun 2023 ini disebabkan pada tahun 2022 Dinas Perhubungan mendapatkan Bansos guna pemulihan bidang transportasi, sasaran Bansos tersebut pemilik angkutan dan ojek berupa bahan bakar minyak dengan jumlah total pagu Bansos Rp 315.000.000,00.

Kegiatan ini memiliki indikator terlayannya jaringan trayek angkutan perkotaan dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Keberhasilan tahun 2022 dan 2023 disebabkan dilakukan perencanaan yang matang, pelaksanaan

koordinasi dengan *stakeholder* terkait, mengevaluasi, inovasi, strategi dan kinerja sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan evolusi perubahan dinamika kebutuhan yang berubah ubah guna mencapai realisasi yang sesuai, serta penguatan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang di dalamnya.

Sehubungan dengan target, capaian dan realisasi pelaksanaan kegiatan program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak berupa Tabel 2.1 yang berupa Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil
Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Lembar : 1

Kode						Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022	Target Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Target Renja 2024	Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 - 2026	
										Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Capaian (&) Tahun 2023		Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d Tahun 2026 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	0				Program Peunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100%	80,00	80,00	99,25	124,06	91,60	90,28	90,28
2	15	1	2	1		Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (PD)	Jumlah dokumen tersedia						4,00	4,00	-
2	15	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						4,00	4,00	-
2	15	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	2 Laporan	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	300,00
2	15	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12,00	27,00	27,00	100,00	28,00	67,00	558,33

Kode						Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022	Target Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Target Renja 2024	Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 - 2026	
										Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Capaian (&) Tahun 2023		Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d Tahun 2026 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	1	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jml tenaga pegawai non PNS tersedia	47 Orang	47,00	12,00	12,00	100,00	12,00	71,00	151,06
2	15	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi yang Kepegawaian terpenuhi	1 Laporan	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	67,00	6.700,00
2	15	1	2	5	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jml SDM pegawai meningkat	84 Orang	84,00					84,00	100,00
2	15	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	84 Orang						-	-
2	15	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	84 Orang		85,00	85,00	100,00	1,00	86,00	102,38
2	15	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi umum yang terpenuhi	5 Laporan	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	68,33	1.366,67
2	15	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	228 Alat	228,00	1,00	1,00	100,00	1,00	230,00	100,88
2	15	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6.454 Jenis	6.454,00	4,00	4,00	100,00	1,00	6.459,00	100,08
2	15	1	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1,00				1,00	2,00	200,00

Kode						Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022	Target Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Target Renja 2024	Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 - 2026	
										Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Capaian (&) Tahun 2023		Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d Tahun 2026 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik tersedia								
2	15	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	203.590 Lembar	203.590,00	1,00	1,00	100,00	1,00	203.592,00	100,00
2	15	1	2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						1,00	1,00	
2	15	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat yang diikuti dan diselenggarakan	402 Perjalanan	402,00	10,00	10,00	100,00	12,00	424,00	105,47
2	15	1	2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang tertata								
2	15	1	2	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi elektronik yang berfungsi								
2	15	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	1 Dokumen	1,00	9,00	9,00	100,00	2,00	4,00	400,00
2	15	1	2	7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
2	15	1	2	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan								

Kode						Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022	Target Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Target Renja 2024	Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 - 2026	
										Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Capaian (&) Tahun 2023		Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d Tahun 2026 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	7 Unit	7,00	9,00	9,00	100,00	2,00	18,00	257,14
2	15	1	2	7	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya tersedia								
2	15	1	2	7	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								
2	15	1	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan								
2	15	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	2 Dokumen	2,00	100,00	100,00	100,00	100,00	67,33	3.366,67
2	15	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	700 Keping	700,00	4,00	4,00	100,00	2,00	706,00	100,86
2	15	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terpenuhi	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	300,00
2	15	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpeliharaan	2 Dokumen	2,00	29,00	29,00	100,00	6,00	37,00	1.850,00

Kode						Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022	Target Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Target Renja 2024	Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 - 2026	
										Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Capaian (&) Tahun 2023		Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d Tahun 2026 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/jabatan yang terpelihara								
2	15	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara	18 Unit	18,00	10,00	10,00	100,00	4,00	32,00	177,78
2	15	1	2	9	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang terpelihara						2,00	2,00	
2	15	1	2	9	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			1,00	1,00	100,00		1,00	
2	15	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin yang terpelihara	25 Unit	25,00	15,00	15,00	100,00	2,00	42,00	168,00
2	15	1	2	9	7	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap terpelihara								
2	15	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi	4 Paket	4,00	3,00	3,00	100,00		7,00	175,00
2	15	1	2	9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung/bangunan yang direhabilitasi								

Kode						Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022	Target Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Target Renja 2024	Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 - 2026	
										Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Capaian (&) Tahun 2023		Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d Tahun 2026 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Bangunan Lainnya									
2	15	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	100%	100,00	100,00	99,06	99,06	100,00	99,69	99,69
2	15	2	2	1		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pengelolaan Jaringan transportasi dan LLAJ tersedia	1 Dokumen	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	300,00
2	15	2	2	1	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jml dokumen perencanaan (Tatralok) dan angka kecelakaan tersedia	2 Paket	2,00	2,00	2,00	100,00	1,00	5,00	250,00
2	15	2	2	2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik	100%	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,67	96,67
2	15	2	2	2	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana perlengkapan jalan tersedia	4 Paket	4,00	50,00	74,00	148,00	10,00	88,00	2.200,00
2	15	2	2	2	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jml fasilitas perlengkapan jalan terpelihara			2,00	2,00	100,00	2,00	4,00	
2	15	2	2	3		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe C terkelola			1,00	1,00	100,00		1,00	
2	15	2	2	3	2	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah terminal tersedia			1,00	1,00	100,00		1,00	

Kode						Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022	Target Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Target Renja 2024	Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 - 2026	
										Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Capaian (&) Tahun 2023		Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d Tahun 2026 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	2	2	3	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah halte terbangun								
2	15	2	2	3	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal/feeder terpelihara								
2	15	2	2	4		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah penerbitan izin dan fasilitas parkir terlaksana	1 Dokumen	1,00	4,00	4,00	100,00	4,00	9,00	900,00
2	15	2	2	4	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah operasional UPTD sarpras perhubungan tersedia	1 Dokumen	1,00	4,00	4,00	100,00	4,00	9,00	900,00
2	15	2	2	5		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase uji kir angkutan umum	100%	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,67	96,67
2	15	2	2	5	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jml Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor Tersedia								
2	15	2	2	5	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah data base wajib uji berkala kendaraan bermotor	1 Paket	1,00	854,00	854,00	100,00	1,00	856,00	85.600,00

Kode						Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022	Target Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Target Renja 2024	Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 - 2026	
										Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Capaian (&) Tahun 2023		Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d Tahun 2026 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	2	2	5	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bukti lulus uji kendaraan bermotor	14000 Kartu	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	1.600,00	29.600,00	211,43
2	15	2	2	5	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor	12 Unit	12,00	9,00	9,00	100,00	11,00	32,00	266,67
2	15	2	2	6		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas terlaksana	1 Laporan	1,00	2,00	2,00	100,00	2,00	5,00	500,00
2	15	2	2	6	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah perlengkapan jalan tersedia	2 Paket	2,00	50,00	50,00	100,00	4,00	56,00	2.800,00
2	15	2	2	6	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan		2,00	2,00	100,00	4,00	6,00	100,00
2	15	2	2	7		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah andalalin tersedia	1 Dokumen	1,00	9,00	9,00	100,00	2,00	12,00	1.200,00

Kode						Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022	Target Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Target Renja 2024	Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 - 2026	
										Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Capaian (&) Tahun 2023		Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d Tahun 2026 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	2	2	7	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah dokumen andalalin di jalan kabupaten	2 Dokumen	2,00	10,00	10,00	100,00	2,00	14,00	700,00
2	15	2	2	7	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Rekomendasi andalalin terlaksana								
2	15	2	2	8		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan tersedia	2 Laporan	2,00	24,00	24,00	100,00	2,00	28,00	1.400,00
2	15	2	2	8	3	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal terlaksana	1 Laporan	1,00	12,00	12,00	100,00	2,00	15,00	1.500,00
2	15	2	2	8	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah kegiatan pengawasan, pengaturan dan operasional lalu lintas terlaksana	2 Kegiatan	2,00	12,00	12,00	100,00	12,00	26,00	1.300,00
2	15	2	2	9		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan angkutan umum	2 Laporan	2,00	1,00	1,00	100,00		3,00	150,00

Kode						Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022	Target Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Target Renja 2024	Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 - 2026	
										Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Capaian (&) Tahun 2023		Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d Tahun 2026 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	2	2	9	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan penumpang tersedia								
2	15	2	2	9	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan operasional angkutan	1 Kegiatan	1,00	1,00	1,00	100,00		2,00	200,00
2	15	2	2	11	2	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaringan trayek angkutan perkotaan								
2	15	2	2	11	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi keselamatan lalu lintas dan pelajar pelopor terlaksana								
2	15	2	2	11	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaringan trayek angkutan perkotaan								

Kode						Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022	Target Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Target Renja 2024	Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 - 2026	
										Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Capaian (&) Tahun 2023		Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d Tahun 2026 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	2	2	25		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlayannya Jaringan Angkutan	1 Dokumen	1,00	3,00	3,00	100,00	2,00	6,00	600,00
2	15	2	2	25	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi keselamatan lalu lintas dan terpilihnya pelajar pelopor	1 Kegiatan	1,00	2,00	2,00	100,00	1,00	4,00	400,00
2	15	2	2	25	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan jasa angkutan terlaksana	3 Kegiatan		1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	66,67

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

Tabel 2.2
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023

N O	Program Unggulan/ Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target Akhir Renstra (2026)	2022		2023						2024		Perkiraan realisasi s.d. 2024		Kode Subkegiatan
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=(7+11+15)	18=(8+12+16)	19
7	PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, TERUTAMA DI KAWASAN PESISIR, PERTANIAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN/ PUSAT PRODUKSI																	
a	Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten	Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	km															
	Pemasangan Rambu Lalu Lintas	Jumlah rambu lalu lintas tersedia	unit	67	455	10	12.524.000	81	114.815.000	81	111.450.000	100	97	66	94.050.000	157	218.024.000	2.15.02.2.06.0016
	Pemasangan APILL	Jml APILL (Traffic Light/Warning Light) terpasang	paket		9	1	79.653.600	-	-	-	-	-	-	-	-	1	79.653.600	2.15.02.2.02.0002
	Pemasangan Lampu Penerangan	Jml lampu penerangan jalan terpasang	Lokasi		20	3	1.589.917.000	4	1.535.000.000	3	1.403.000.000	75	91	5	1.550.000.000	11	4.542.917.000	2.15.02.2.02.0002

N O	Program Unggulan/ Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target Akhir Renstra (2026)	2022		2023						2024		Perkiraan realisasi s.d. 2024		Kode Subkegiatan
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Target	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi	
															Anggaran (APBD)		Anggaran (APBD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=(7+11+15)	18=(8+12+16)	19
	Jalan																	
	Pembuatan Marka Jalan	Jml marka jalan tersedia	m2		1.300	1.014	199.454.000	500	100.000.000	500	95.000.000	100	95	780	210.400.000	2.294	504.854.000	2.15.02.2.06.0016
	Pemasangan CCTV	Jml CCTV terpasang	paket		8	-	-	2	100.000.000	4	99.500.000	200	100	-	-	4	99.500.000	2.15.02.2.02.0002
	Pemeliharaan CCTV	Jml CCTV jalan terpelihara	Lokasi		12	3	58.950.000	3	70.000.000	8	68.975.000	267	99	2	20.000.000	13	147.925.000	2.15.02.2.02.0004

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup kerjanya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diampu sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 diukur dengan Indikator kinerja yang disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Masing-masing Urusan memiliki Indikator sendiri sendiri. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Demak

NO	Indikator	IKU	SPM/ Standar Nasional	IKK					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	V			78,96	78,98	79,00	79,50	78,76	78,94	78,97	79,20	
2	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah Yang Mencapai Target	V			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	V			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi	V			88,20	89,30	91,60	93,20	88,25	90,47	88,87	90,25	
5	Kinerja Lalu Lintas	V		V	0,38	0,41	0,41	0,42	0,21	0,22	0,28	0,23	
6	Rasio Konektifitas Kabupaten			V	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
7	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum				32700,00	34100,00	36900,00		18586,00	9584,00	21900,00	22150,00	

NO	Indikator	IKU	SPM/ Standar Nasional	IKK					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8	Rasio Ijin Trayek				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum				11269,00	11569,00	11869,00	12169,00	10159,00	10277,00	10857,00	10987,00	
10	Jumlah Pelabuhan/ Terminal Bus				1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
11	Persentase Layanan Angkutan Darat				0,23	0,21	0,19	0,18	0,38	0,38	0,39	0,40	
12	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum				87,86	88,15	88,37	88,57	77,26	79,51	89,68	89,87	
13	Pemasangan Rambu – Rambu				88,36	89,08	89,52	89,92	103,00	81,00	90,00	100,00	
14	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Jumlah Orang Melalui Dermaga/ Terminal Per Tahun				32700,00	34100,00	36900,00	40400,00	18586,00	15256,00	21900,00	22150,00	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran akan sulit tercapai. Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganannya karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang.

Oleh karena itu penentuan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu-isu strategis yang tepat dan bersifat strategis yaitu meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis untuk menentukan isu-isu strategis yang telah dilakukan, diperoleh rumusan isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Belum tersedianya dokumen teknis sebagai acuan dalam pengembangan jaringan transportasi;
2. Terbatasnya penyediaan fasilitas sarana dan prasarana LLAJ dalam menjamin keselamatan, kelancaran keamanan, kenyamanan bagi pengguna transportasi dan mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas;
3. Rendahnya disiplin dan tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas;
4. Belum optimalnya penanganan parkir di Kabupaten Demak;
5. Belum optimalnya kualitas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor;
6. Belum optimalnya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten;
7. Belum optimalnya perlengkapan jalan di kabupaten/kota;
8. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas

parkir;

9. Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum;
10. Belum adanya rancangan konektivitas dan integrasi bidang lalu lintas angkutan jalan yang akan mendukung efisiensi mobilitas transportasi pada Kabupaten Demak; dan
11. Belum terpenuhinya sarana dan prasana pada perlintasan sebidang yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan.

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Perhubungan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Perhubungan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Perhubungan.

Kebijakan Pemerintah diambil sebagai arah dalam menentukan program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal maupun eksternal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program- program pembangunan yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Program BRT Trans Jateng adalah program pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memenuhi pelayanan masyarakat dibidang transportasi massal terutama untuk konektivitas wilayah Kedungsepur koridor 3 yaitu jalur Semarang-Demak.

Kebijakan pemerintah untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pengembangan kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kabupaten Demak akan melaksanakan perluasan

kawasan perkotaan di Kabupaten Demak yang diharapkan kawasan perkotaan yang aman, nyaman, indah dan berkesinambungan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD berupa perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Demak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	URUSAN PERHUBUNGAN				32.442.858	URUSAN PERHUBUNGAN				41.951.914	
I	Program Peunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	93,2	29.782.858	Program Peunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	93,2	35.159.614	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah dokumen tersedia			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah dokumen tersedia	2 Dokumen	20.000	
a	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	20.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	1	6.001.049	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan	8.120.305	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 org	4.576.049	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	4.576.049	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47 orang	1.425.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3.544.256	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	1 Laporan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	1 Laporan	5.000	
a	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	300.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 laporam	450.000	
a	Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	82 orang	150.000	Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang	300.000	
b	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 orang	150.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Orang	150.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	791.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 laporam	697.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	228 jenis	25.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 unit	245.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	250.000	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	859 jenis	25.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.000	
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah bahan logistik tersedia			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah bahan logistik tersedia	-		
e	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5750 lembar, 197245 lembar	60.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	60.000	
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	30.000	
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64 kali	280.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	280.000	
h	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2480 exp	6.500	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	7.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
i	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 aplikasi	150.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	10.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 paket	450.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	1.020.000	
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1 unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1 Unit	70.000	
b	Pengadaan Mebel	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Pengadaan Mebel	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	200.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	350.000	
d	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah aset tetap lainnya tersedia	11 unit		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah aset tetap lainnya tersedia			
e	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3 paket	250.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3 Unit	450.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
f	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3 paket		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 Unit	150.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	21.170.308	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	23.711.808	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	700 keping	1.450	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	2 Laporan	2.000	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	21.168.858	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	23.644.808	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		65.000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah BMD yang terpeliharaan	1	1.070.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah BMD yang terpeliharaan	6 Paket	1.140.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 unit	125.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya		150.000	
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	225.000	
c	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 unit	160.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	50.000	
d	Pemeliharaan Mebel	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Mebel yang Dipelihara			Pemeliharaan Mebel	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Mebel yang Dipelihara		90.000	
e	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 unit	35.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Mebel yang Dipelihara		75.000	
f	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah aset tetap terpelihara	32 unit		Pemeliharaan aset tetap lainnya	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah aset tetap terpelihara			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
g	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	300.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000	
h	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	250.000	
i	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	200.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	100.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan Kab. Demak dan Ruas Jalan Kabupaten Demak	Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang mendukung standar pelayanan publik	100	2.660.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan Kab. Demak dan Ruas Jalan Kabupaten Demak	Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang mendukung standar pelayanan publik	100	6.792.300	
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Ruas Jalan Kabupaten Demak	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Ruas Jalan Kabupaten Demak	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
a	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Ruas Jalan Kabupaten Demak	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 paket	30.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Ruas Jalan Kabupaten Demak	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dokumen	30.000	
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Ruas Jalan Kabupaten Demak	Tersedianya Dan Terpeliharanya Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	100	1.400.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Ruas Jalan Kabupaten Demak	Tersedianya Dan Terpeliharanya Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	100	1.200.000	
a	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Ruas Jalan Kabupaten Demak	Jumlah Prasarana jalan tersedia			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Ruas Jalan Kabupaten Demak	Jumlah Prasarana jalan tersedia	-	50.000	
b	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Ruas Jalan Kabupaten Demak	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 paket	900.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Ruas Jalan Kabupaten Demak	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	735.000	
c	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Ruas Jalan Kabupaten Demak	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 paket	500.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Ruas Jalan Kabupaten Demak	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	415.000	
3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terimal Kebonbatur, Mranggen	Terpenuhinya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1 unit	100.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terimal Kebonbatur, Mranggen	Terpenuhinya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	600.000	
a	Pembangunan Gedung Terminal	Terimal Kebonbatur, Mranggen	Jumlah terminal tersedia	1 lokasi	100.000	Pembangunan Gedung Terminal	Terimal Kebonbatur, Mranggen	Jumlah terminal tersedia	-		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
b	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terimal Kebonbatur, Mranggen	Jumlah halte terbangun	2 unit		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terimal Kebonbatur, Mranggen	Jumlah halte terbangun	-	500.000	
c	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terimal Kebonbatur, Mranggen	Jumlah terminal/feeder terpelihara	1 paket		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terimal Kebonbatur, Mranggen	Jumlah terminal/feeder terpelihara	-	100.000	
4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kabupaten Demak	Terfasilitasinya Penyusunan Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1 Kegiatan	75.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kabupaten Demak	Terfasilitasinya Penyusunan Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1 Dokumen	150.000	
a	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Demak	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Kegiatan	75.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Demak	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	150.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Meningkatnya Kualitas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	150.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Meningkatnya Kualitas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	1.835.000	
a	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 paket		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	-	1.600.000	
b	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1 paket		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1 Unit	60.000	
c	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	14.000 kartu	50.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1600 Dokumen	75.000	
d	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	100.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Demak dan Ruas Jalan Kabupaten Demak	Meningkatnya Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100	220.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Demak dan Ruas Jalan Kabupaten Demak	Meningkatnya Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 laporan	2.775.000	
a	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Ruas Jalan Kabupaten Demak	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2 paket	220.000	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Ruas Jalan Kabupaten Demak	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4 Dokumen	2.750.000	
b	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 paket		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	25.000	
7	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Ruas Jalan Kabupaten Demak	Meningkatnya Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	1	50.000	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Ruas Jalan Kabupaten Demak	Meningkatnya Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	50.000	
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Ruas Jalan Kabupaten Demak	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1	30.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Ruas Jalan Kabupaten Demak	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2 Laporan	30.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
b	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Ruas Jalan Kabupaten Demak	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1	20.000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Ruas Jalan Kabupaten Demak	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	-	20.000	
8	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Meningkatnya Hasil Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan Yang Ditindaklanjuti	1	550.000	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Meningkatnya Hasil Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan Yang Ditindaklanjuti	2 Laporan	550.000	
a	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	8 ok	200.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	2 Laporan	200.000	
b	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 paket	350.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan Kab. Demak	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	350.000	
9	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Demak	Tersedianya Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Laik Jalan	100	50.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Demak	Tersedianya Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Laik Jalan	2 Dokumen	82.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
a	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Demak	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 unit		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Demak	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	42.300	
b	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Demak	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	50.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Demak	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.000	
10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Demak	Tersedianya Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	35.000	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Demak	Tersedianya Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	120.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
a	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Demak	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	80 orang	10.000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Demak	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70.000	
b	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Demak	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 kegiatan	25.000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Demak	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di mana dalam Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka dilaksanakan pemetaan (*mapping*) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang didanai dari DAK Fisik, DAK Non Fisik dan DBHCHT. Hasil pemetaan (*mapping*) tersebut mengakibatkan berubahnya sub kegiatan pada formasi usulan pada Rankhir Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

Berikut ini adalah tabel uraian indikator, target kinerja program dan kegiatan Dinas Perhubungan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut:

Uraian Indikator, Target Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Perhubungan

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					28.878.895.471		30.103.738.525		32.056.703.023		32.442.858.061		33.040.309.023
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	%	85,2	28.304.395.471	89,3	25.723.738.525	91,60	29.291.703.023	93,20	29.782.858.061	95,90	30.010.309.023
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	Dokumen										
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen										
2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen										

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen										
2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen										
2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen										
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan										

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan										
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	100 %	5.167.165.606	2 Laporan	5.218.879.525	1	5.781.819.060	1	6.001.049.372	1	6.102.995.427
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	28 Orang	3.742.165.606	28 Orang	3.796.817.125	28 Orang	4.356.819.060	28 Orang	4.576.049.372	28 Orang	4.677.995.427
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	47 Orang	1.425.000.000	47 Orang	1.422.062.400	47 Orang	1.425.000.000	47 Orang	1.425.000.000	47 Orang	1.425.000.000
2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen										
2	15	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen										
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan										

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	15	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen										
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan										
2	15	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen										
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	Laporan										
2	15	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen										

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	15	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen										
2	15	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan										
2	15	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan										
2	15	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan										
2	15	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan										
2	15	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen										
2	15	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat	Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	Jumlah laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	Dokumen										

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah yang sudah direkonsiliasi											
2	15	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen										
2	15	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen										
2	15	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan										
2	15	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen										
2	15	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan										
2	15	01	2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen										
2	15	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen										

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						Retribusi Daerah												
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	%					1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000
2	15	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit					82 Orang	150.000.000	82 Orang	150.000.000	82 Orang	150.000.000
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					75 Orang	150.000.000	75 Orang	150.000.000	75 Orang	150.000.000
2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen										
2	15	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen										
2	15	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen										
2	15	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang										
2	15	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang	Laporan										

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Tugas	Melaksanakan Tugas	Meninggal dalam Melaksanakan Tugas											
2	15	01	2.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahanb Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaska n	Orang										
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang										
2	15	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang										
2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang										
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100 %	235.000.000,00	7 Laporan	202.399.000	1	741.000.000	1	791.500.000	1	832.000.000
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	228 Jenis	20.000.000	1 Paket	5.000.000	228 Jenis	20.000.000	228 Jenis	25.000.000	228 Jenis	30.000.000

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5 Unit	110.000.000	1 Paket	78.000.000	5 Unit	220.000.000	5 Unit	245.000.000	5 Unit	250.000.000
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	859 Jenis	5.000.000	-	-	859 Jenis	20.000.000	859 Jenis	25.000.000	859 Jenis	30.000.000
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket										
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5750 Lbr & 1972 45 Lbr	20.000.000	1 Paket	19.399.000	5750 Lbr & 197245 Lbr	60.000.000	5750 Lbr & 197245 Lbr	60.000.000	5750 Lbr & 197245 Lbr	65.000.000
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen										
2	15	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket										
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan										
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	64 Kali	80.000.000	64 Kali	100.000.000	64 Kali	265.000.000	64 Kali	280.000.000	64 Kali	300.000.000
2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen					2480 Exp	6.000.000	2480 Exp	6.500.000	2480 Exp	7.000.000

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	15	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					5 Aplikasi	150.000.000	5 Aplikasi	150.000.000	5 Aplikasi	150.000.000
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit					2 Paket	395.000.000	1 Paket	450.000.000	1 Paket	480.000.000
2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit										
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit									1 Unit	30.000.000
2	15	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit										
2	15	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit										
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit										
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan	Tersedianya Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan dan	Unit					7 Unit	195.000.000	7 Unit	200.000.000	7 Unit	200.000.000

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Mesin Lainnya	Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Disediakan											
2	15	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit										
2	15	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit										
2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit										
2	15	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit				3 Paket	200.000.000	3 Paket	250.000.000	3 Paket	250.000.000	
2	15	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit										
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	%	100 %	22.711.681.865	100 %	20.149.460.000	1	21.018.883.963	1	21.170.308.689	1	21.200.313.596
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	700 Keping	1.200.000	720 Keping	1.500.000	700 Keping	1.350.000	700 Keping	1.450.000	700 Keping	1.500.000
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Laporan	100 %	22.710.481.865	12 Laporan	20.147.960.000	1	21.017.533.963	1	21.168.858.689	1	21.198.813.596

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							dan Listrik yang Disediakan											
2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan										
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan										
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	Unit	100 %	190.548.000	6 Paket	153.000.000	1	1.055.000.000	1	1.070.000.000	1	1.095.000.000
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			7 Unit	120.000.000	5 Unit	125.000.000	5 Unit	125.000.000	5 Unit	125.000.000
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19 Unit	180.000.000			19 Unit	250.000.000	19 Unit	250.000.000	19 Unit	250.000.000

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	15	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit					2 Unit	150.000.000	2 Unit	160.000.000	2 Unit	175.000.000
2	15	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit										
2	15	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit										
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15 Unit	10.548.000	15 Unit	15.000.000	15 Unit	30.000.000	15 Unit	35.000.000	15 Unit	45.000.000
2	15	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit										
2	15	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit										
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			3 Unit	18.000.000	3 Unit	300.000.000	3 Unit	300.000.000	3 Unit	300.000.000
2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit					2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Lainnya	atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitas											
2	15	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit										
2	15	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha										
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang mendukung standar pelayanan publik	Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	Persen	100 %	574.500.000	100 %	4.380.000.000	100%	2.765.000.000	100%	2.660.000.000	100%	3.030.000.000
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen pengelolaan jaringan transportasi dan Lalu Lintas Jalan tersedia .	Dokumen	100 %	20.000.000	1 Dokumen	10.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	2 Paket	20.000.000	1 Dokumen	10.000.000	2 Paket	30.000.000	2 Paket	30.000.000	2 Paket	35.000.000

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen										
2	15	02	2.01	0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen										
2	15	02	2.01	0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen										
2	15	02	2.01	0006	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen										
2	15	02	2.01	0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan										
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dan Terpeliharanya Perlengkapan Jalan Di Jalan	Persentase sarana perlengkapan dalam kondisi baik	%	100 %	120.000.000	100 %	3.335.000.000	100%	1.450.000.000	100%	1.400.000.000	100%	1.350.000.000

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						Kabupaten/Kota												
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit										
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit			1 Paket	3.185.000.000	1 Paket	1.000.000.000	1 Paket	900.000.000	1 Paket	800.000.000
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1 Paket	120.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	450.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	550.000.000
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit										
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terpenuhinya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe C terkelola .	Unit			3 Unit	200.000.000	100%	200.000.000	100%	100.000.000	100%	200.000.000
2	15	02	2.03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen										
2	15	02	2.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Dokumen										
2	15	02	2.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe C	Terlaksananya Revitalisasi	Jumlah Terminal yang	Unit										

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					(Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)											
2	15	02	2.03	0008	Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	Tersedianya sistem informasi manajemen terminal Penumpang tipe C	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	Unit										
2	15	02	2.03	0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit			1 Unit	200.000.000	1 Lokasi	200.000.000			2 Unit	100.000.000
2	15	02	2.03	0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	Orang										
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit							1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggara n dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terfasilitasinya Penyusunan Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggara n Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan izin dan fasilitas parkir terlaksana.	Dokumen	100 %	20.000.000	100 %	200.000.000	100%	60.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	15	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	200.000.000	1 Kegiatan	60.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	1	75.000.000
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan										
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kualitas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase uji KIR angkutan umum	%	100 %	244.000.000	100 %	210.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	235.000.000
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit										

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang										
2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit			1 Paket	60.000.000					1 Paket	50.000.000
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	14.000 Kartu	150.000.000	2000 Kartu	50.000.000	14000 Kartu	50.000.000	14000 Kartu	50.000.000	14000 Kartu	60.000.000
2	15	02	2.05	0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan										
2	15	02	2.05	0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan										
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala	Unit	9 Unit	94.000.000	9 Unit	100.000.000	9 Unit	100.000.000	9 Unit	100.000.000	9 Unit	125.000.000

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Berkala Kendaraan Bermotor	Berkala Kendaraan Bermotor	Kendaraan Bermotor yang Terpelihara											
2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan										
2	15	02	2.05	0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Ditetapkannya Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan										
2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan										
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas terlaksana	Laporan	100 %	15.000.000	100 %	210.000.000	100%	330.000.000	100%	220.000.000	100%	350.000.000
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan	Laporan										

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							Kabupaten/Kota											
2	15	02	2.06	0006	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terpenuhinya dan Terbitnya Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dokumen										
2	15	02	2.06	0007	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	Laporan										
2	15	02	2.06	0008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Terbangunnya Rute Aman Selamat Sekolah	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	Unit										
2	15	02	2.06	0009	Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan										
2	15	02	2.06	0010	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZoSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan										
2	15	02	2.06	0011	Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem	Meningkatnya Kompetensi Penilai Sistem	Jumlah Penilai Sistem Manajemen	Orang										

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan										
									2022		2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya												
2	15	02	2.06	0012	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Terbangunnya implementasi batas kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	Unit											
2	15	02	2.06	0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Unit											
2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen											
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan			2 Kegiatan	10.000.000							
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dokumen	2 Paket	15.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	330.000.000	2 Paket	220.000.000	2 Paket	350.000.000	

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Laporan										
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah andalalin tersedia	Laporan	100 %	10.000.000	2 Laporan	15.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	60.000.000
2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	100 %	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	100%	20.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000
2	15	02	2.07	0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Orang										
2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Laporan			12 Laporan	5.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	30.000.000
2	15	02	2.07	0007	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Dokumen										

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Meningkatnya Hasil Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan tersedia	Laporan	100 %	115.500.000	2 Lapo ran	120.000.000	100%	450.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000
2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan					8 Orang/ Kegiata n	150.000.000	8 Orang/ Kegiata n	200.000.000	8 Orang/ Kegiata n	200.000.000
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan										
2	15	02	2.08	0006	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Laporan										
2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2 Paket	115.500.000	12 Lapo ran	120.000.000	2 Paket	300.000.000	2 Paket	350.000.000	2 Paket	400.000.000
2	15	02	2.08	0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektro Lalu Lintas dan	Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektro Lalu Lintas dan	Jumlah Auditor dan Inspektro Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang	Orang										

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Angkutan Jalan	Angkutan Jalan	ditingkatkan kapasitasnya											
2	15	02	2.08	0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan										
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Laik Jalan	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum	Laporan	100 %	30.000.000	2 Laporan	30.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	1	70.000.000
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit									2 Unit	20.000.000
2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen										
2	15	02	2.10	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen										
2	15	02	2.10	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk	Dokumen										

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan										
									2022		2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota												
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlayannya jaringan trayek angkutan perkotaan	Dokumen			100 %	50.000.000	100%	25.000.000	100%	35.000.000	100%	55.000.000	
2	15	02	2.11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen											
2	15	02	2.11	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			80 Dokumen	25.000.000			80 Orang	10.000.000	80 Orang	20.000.000	
2	15	02	2.11	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			1 Dokumen	25.000.000	3 Kegiatan	25.000.000	3 Kegiatan	25.000.000	3 Kegiatan	35.000.000	

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen										
2	15	02	2.12	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen										
2	15	02	2.12	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen										
2	15	02	2.13		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu)	Tersedianya Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya	Dokumen Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya	Dokumen										

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan										
									2022		2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Daerah Kabupaten/Kota	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
2	15	02	2.13	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen											
2	15	02	2.13	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen											

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	15	02	2.13	0003	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen										
2	15	02	2.13	0004	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan penetapan wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen										
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggara n Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penerbitan Izin Penyelenggara n Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggara n Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen										

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan										
2	15	02	2.14	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit										
2	15	02	2.15		Penerbitan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Terfasilitasinya Penyusunan Dokumen Penyelenggaraa n Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a terlaksana	Dokumen										

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	15	02	2.15	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terpenuhinya Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	Unit										
2	15	02	2.15	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen										
2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah	Tersedianya Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah	Dokumen Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah	Dokumen										

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota											
2	15	02	2.16	0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen										
2	15	02	2.16	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen										
2	15	02	2.16	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan										
2	15	02	2.16	0004	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi	Terselenggaranya Sistem Manajemen Transportasi	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem	Dokumen										

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kegiatan									
									2022		2023		2024		2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Cerdas	Cerdas	Manajemen Transportasi Cerdas											

Sumber: Dinas Perhunungan, 2024

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses *bottom-up* dan *topdown*.

Proses usulan program/kegiatan terhadap usulan para pemangku kepentingan sudah dipadukan sesuai dengan proses perencanaan, keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk menserasikan perencanaan *bottom up* dengan perencanaan yang bersifat *top down* sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif.

Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut usulan masyarakat baik lewat organisasi atau tokoh masyarakat, dan para pemangku kepentingan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten
Demak Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

No	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pokir				
1	Penerangan Jalan Umum	Dukuh Genteng Desa Sedo Kecamatan Demak	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket Rp. 100.000.000,00	Terakomodir
2	Penerangan Jalan Umum	Desa Karangrejo Kecamatan Bonang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket Rp. 200.000.000,00	Terakomodir
3	Penerangan Jalan Umum	Desa Sarirejo Kecamatan Guntur	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket Rp. 160.000.000,00	Terakomodir
4	Penerangan Jalan Umum	Desa Banjarejo Kecamatan Guntur	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket Rp. 150.000.000,00	Terakomodir
5	Penerangan Jalan Umum	Kecamatan Mranggen	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket Rp. 1.000.000.000,00	Belum Terakomodir
6	Penerangan Jalan Umum	BKK Desa Kandalasem Kecamatan Wesung	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket Rp. 200.000.000,00	Belum Terakomodir
7	Penerangan Jalan Umum	Desa Arah Kota Bengkal Kecamatan Mijen	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket Rp. 100.000.000,00	Belum Terakomodir
8	Penerangan Jalan Umum	Ruas Jalan Kracaan – Sedo	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket Rp. 100.000.000,00	Belum Terakomodir
9	Penerangan Jalan Umum	Jalan Pecaon Kelurahan Kadilangu	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket Rp. 50.000.000,00	Belum Terakomodir
10	Penerangan Jalan Umum	BKK Desa Tanggul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket Rp. 200.000.000,00	Belum Terakomodir
11	Penerangan Jalan Umum	Meterisasi Se Kecamatan Karangawen	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket Rp. 100.000.000,00	Belum Terakomodir

No	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Musrenbangcam				
1	Penerangan Jalan Umum	Jalan Ruas Jalan Demung -Trengguli (Mojodemak-Trengguli) Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket Rp. 300.000.000,00	Terakomodir
2	Penerangan Jalan Umum	Jalan Ruas Jalan Mboyor-Singopadu (Desa Sidorejo, Kecamatan Karangawen) Desa Sidorejo Kecamatan Karangtengah	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket Rp. 300.000.000,00	Terakomodir
3	Penerangan Jalan Umum	Jalan Ruas Jalan Ngegot-Jleper-Ngegot-Rejosari Desa Ngegot Kecamatan Mijen	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket Rp. 300.000.000,00	Terakomodir
4	Penerangan Jalan Umum	Jalan Ruas Jalan Pamongan-Bulusari (Desa Sidokumpul) Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket Rp. 200.000.000,00	Terakomodir
5	Penerangan Jalan Umum	Penerangan Jalan Ruas Jalan Ruas Jalan Jetak-Bungo Desa Jetak Kecamatan Wedung	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket Rp. 200.000.000,00	Terakomodir
6	Perlengkapan Jalan	Jalan Ruas Jalan Mranggen - Bulusari (Ruas Jalan Tumpi - Waru)	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Paket Rp. 250.000.000,00	Terakomodir
7	Penerangan Jalan Umum	Ruas Jalan Gempolsongo Jalan Raya Mijen - Karanganyar	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket Rp. 300.000.000,00	Belum Terakomodir
8	Penerangan Jalan Umum	Ruas Jalan Mijen - Pecuk	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket Rp. 560.000.000,00	Belum Terakomodir

No	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Penerangan Jalan Umum	Ruas Jalan Desa Tedunan – Mutih Kulon	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket Rp. 200.000.000,00	Belum Terakomodir
10	Penerangan Jalan Umum	Ruas Jalan Kedungmutih – Babalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket Rp. 200.000.000,00	Belum Terakomodir
11	Penerangan Jalan Umum	Ruas Jalan Menco Berahan Wetan – Bungo	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket Rp. 300.000.000,00	Belum Terakomodir

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan rencana strategis kementerian yang mendukung pembangunan Kabupaten Demak, maka program dari Renstra Kementerian Perhubungan di Kabupaten Demak adalah :

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Berdasarkan tujuan kementerian perhubungan, perlu disusun pembangunan sub sector perhubungan darat, yaitu :

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dengan satuan rasio;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat dengan satuan indeks;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat dengan satuan kendaraan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Perhubungan sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang Perhubungan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Perhubungan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan;
2. Meningkatkan pelayanan jaringan transportasi.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya capaian sasaran strategis kinerja Perangkat Daerah;
2. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif;
3. Meningkatnya kinerja pelayanan lalu lintas.

Sehubungan dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 mempunyai beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

NO	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
						2020 (realisasi)	2021 (realisasi)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja PD			Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	Angka	78,45	76	78,96	78,98	79	79,5	80	80
2		Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	Nilai yang diperoleh dari hasil kinerja sasaran dibagi jumlah indikator sasaran	%	100	97,44	100	100	100	100	100	100
3		Terwujudnya pelayanan publik yang responsive	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan dibagi jumlah penanganan pengaduan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatkan pelayanan jaringan transportasi			Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang	Angka	85,2	87,72	88,20	89,3	91,,6	93,2	95,9	95,9

NO	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ KE SASARAN PADA TAHUN					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
						2020 (realisasi)	2021 (realisasi)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5		Meningkatnya kinerja pelayanan lalu lintas	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Jumlah perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan	Angka	0,30	0,19	0,38	0,41	0,41	0,42	0,43	0,43
			Rasio konektivitas Kabupaten	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	Rasio	81	81	81	81,05	81,05	82	82	82
			Rasio ijin trayek	Jumlah perbandingan banyaknya jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut.	Rasio	101	154	0,00011	0,00011	0,00011	0,00011	0,00012	0,00012
			Jumlah uji kir angkutan umum	pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri maupun import yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan	Unit	10.938	9.036	11.269	11.569	11. 869	12.169	12.469	12.469

NO	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
						2020 (realisasi)	2021 (realisasi)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Terminal Bus	Terminal bus diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum	Unit	3	1	1	1	2	2	2	2
			Persentase layanan angkutan darat	jumlah perbandingan banyaknya angkutan darat dengan jumlah orang yang menggunakan angkutan darat (penumpang) pada tahun tersebut.	%	0,196	0,260	0,23	0,21	0,19	0,17	0,16	0,16

NO	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
						2020 (realisasi)	2021 (realisasi)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	perbandingan antara jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum dengan jumlah angkutan umum pada tahunn	%	110,03	60,48	87,86	88,15	88,37	88,57	88,77	88,77
			Persentase Pemasangan Ramburambu	jumlah pemasangan rambu-rambu dibagi dengan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikalikan dengan bilangan 100	%	85,21	87,53	88,36	89,08	89,52	89,92	90,01	90,01
			Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan	Rasio	0,0011	0,0010	0,0010	0,0009	0,0009	0,0008	0,0008	0,0008
			Jumlah orang melalui terminal per tahun	Jumlah penumpang bus (yang masuk terminal)	Jiwa	64.840	27.393	32.700	34.100	36.900	40.400	42.600	42.600

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan subkegiatan Renja Dinas Perhubungan yaitu:

a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Demak serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka harus berdasarkan visi dan misi Bupati. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Demak pada akhir periode. Visi Kabupaten Demak menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Demak baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan dan isu-isu strategis, maka visi Kabupaten Demak adalah “Demak Bermartabat Maju dan Sejahtera” Adapun misi Bupati Demak yaitu :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik,serta kehidupan bermasyarakat yang agamis,kondusif dan berbudaya;
2. Meningkatkan sumber daya manusia, sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi local, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang Perhubungan maka perlu adanya tujuan dan sasaran, adapun tujuan Dinas Perhubungan adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan;
2. Meningkatkan pelayanan jaringan transportasi.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatnya capaian sasaran strategis kinerja Perangkat Daerah;
2. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif;
3. Meningkatnya kinerja pelayanan lalu lintas.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

a. Jumlah program dan jumlah kegiatan. Bahwa berdasarkan permendagri 90 tahun 2019 bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Demak terdapat dua Program yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota;
2. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Adapun rician jumlah kegiatan dan sub kegiatan yaitu terdapat 2 program, 15 kegiatan dan 26 sub kegiatan yang tidak terfokus pada Kawasan atau kelompok masyarakat tertentu namun bersifat pemerataan berkesinambungan dan berkelanjutan. Berkaitan dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dan mendukung kegiatan bersifat *supporting system* di Kabupaten Demak untuk optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan kegiatan yang didalamnya terdapat beberapa perangkat daerah yang terkait sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dalam rangka *supporting* penuntasan penurunan kemiskinan, pada kegiatan tersebut dengan sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa Honor Juru Parkir Pasar, Tepi Jalan sejumlah Rp. 1.100.000.000,00.

2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Berkaitan dengan adanya *supporting* penuntasan penurunan Kemiskinan dan Persiapan Kota/Kabupaten Sehat (KKS) yang pengampu Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Kabupaten Layak Anak (KLA), Data Dukung PPRG (Penyusunan Penganggaran Responsif Gender) dengan pengampu Dinas Sosial P2PA. Output dalam sub kegiatan ini berupa Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (APJ).

3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan sinkronisasi program antar Perangkat Daerah dalam kegiatan ini sangat berperan beberapa sub kegiatan diantaranya sebagai berikut:

a. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Pada Sub Kegiatan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak mengadakan sebuah forum lalu lintas, dimana peserta yang mengikuti Polres Demak, Dinputaru dan Bappeda serta *stakeholder* terkait. Dengan adanya kegiatan tersebut membahas terkait permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di Kabupaten Demak untuk dijadikan bahan perencanaan guna mendukung transportasi yang berkelanjutan dan maju.

b. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Sehubungan dengan adanya sub kegiatan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mendukung antar Perangkat Daerah diantaranya Persiapan Kota/Kabupaten Sehat (KKS) yang pengampu Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Kabupaten Layak Anak (KLA), Data Dukung HAM yang berada pada Terimnal Penumpang Tipe C, Data Dukung PPRG (Penyusunan Penganggaran Responsif Gender) dengan pengampu Dinas Sosial P2PA. Output dalam kegiatan ini berupa pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan berupa marka jalan, rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan.

4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Dalam pencapaian hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) melalui pemaparan oleh konsultan, maka diperlukan koordinasi antara Polsek Demak (Satlantas) dan Dinputaru guna mengetahui kondisi eksisting pada lokasi yang dilakukan analisis dampak lalu lintas (Andalalin) yang

digunakan sebagai keabsahan dokumen andalalin serta rekomendasi pelaksanaan andalalin tersebut. Output sub kegiatan ini berupa monitoring pelaksanaan andalalin.

5. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Dalam rangka *supporting* penuntasan kemiskinan pada Kabupaten Demak pada kegiatan ini ada sub kegiatan pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum terdapat gaji dan honor petugas perlintasan sebidang kereta api.

6. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Berkaitan dengan sinkronisasi program antar Perangkat Daerah dalam kegiatan ini mempunyai sub Kegiatan yang bekerja sama dengan Kanwil Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Korwil Kemenag untuk mengundang SMA/ MA guna mengikuti Pelajar Pelopor Keselamatan yang mempersentasikan karya ilmiah dan diperlombakan antar SMA/ MA se Kabupaten Demak dan juara 1 dan 2 berhak lanjut menuju tingkat Provinsi serta Nasional. Output sub kegiatan ini berupa kegiatan pelajar pelopor keselamatan.

7. Dukungan Sinkronisasi Kegiatan Lainnya

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak salah satu Perangkat Daerah *supporting* pencapaian dukungan kegiatan antar Perangkat Daerah Seperti:

- a. Dukungan Ui Green City;
- b. Dukungan Kota Cerdas;
- c. Dukungan Pariwisata.

Untuk itu lokasi program dan kegiatan tersebar seluruh Kabupaten Demak dalam wilayah kecamatan dan desa/kelurahan sesuai dengan prioritas kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dibawah ini terdapat tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun

2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 rencana program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Kabupaten Demak sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Pagu Dana					
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancanga n Renja 2025	Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2025	Berkurang/ Bertambah	Renja 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (12-9)	14
	URUSAN PERHUBUNG AN							32.785.428.306	32.442.858.061	41.951.914.561	34.757.520.400	1.972.092.094	33.027.109.023
1	Program Peunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanan ya monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	91,60	93,20	93,20	93,20	95,90	29.409.128.306	29.782.858.061	35.159.614.561	29.187.899.400	- 221.228.906	30.004.809.023
1	Perencanaan, Penggangan , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen tersedia	2 Dokumen	-	2 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	-	20.000.000	22.429.000	2.429.000	17.000.000
	1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	-	20.000.000	-	20.000.000	22.429.000	2.429.000	17.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan	1	2 Laporan	12 Dokumen	1	6.334.028.306	6.001.049.372	8.120.305.872	6.251.120.400	- 82.907.906	6.120.495.427
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	28 Orang/ bulan	28 org	28 Orang/ bulan	28 Orang/bulan	28 org	4.607.572.506	4.576.049.372	4.576.049.372	4.161.044.000	- 446.528.506	4.670.495.427

No			Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana						
					APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancanga n Renja 2025	Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2025	Berkurang/ Bertambah	Renja 2026
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (12-9)	14
				ASN											
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	47 orang	12 Dokumen	12 Dokumen	47 orang	1.726.455.800	1.425.000.000	3.544.256.500	2.090.076.400	363.620.600	1.450.000.000
	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	5.000.000	500.000	500.000	5.000.000
		1	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	5.000.000	500.000	500.000	5.000.000
	4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 laporam	1	2 laporam	100%	1	2.000.000	300.000.000	450.000.000	270.000.000	268.000.000	350.000.000
		1	Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	82 orang	85 Orang	1 Unit	82 orang	2.000.000	150.000.000	300.000.000	270.000.000	268.000.000	200.000.000
		2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	-	75 orang	85 Orang	-	75 orang	-	150.000.000	150.000.000	-	-	150.000.000

No				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Pagu Dana					
						APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancang an Renja 2025	Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2025	Berkurang/ Bertambah	Renja 2026
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (12-9)	14
			ya	Atribut Kelengkapan												
	5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administras i Umum Perangkat Daerah	2 laporam	100	2 laporam	100%	100	194.000.000	791.500.000	697.500.000	262.136.000	68.136.000	752.500.000	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	228 jenis	1 Paket	1 Paket	228 jenis	10.000.000	25.000.000	35.000.000	15.000.000	5.000.000	40.000.000	
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	1 Paket	5 unit	1 Paket	1 Paket	5 unit	80.000.000	245.000.000	250.000.000	82.200.000	2.200.000	275.000.000	
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	859 jenis	1 Paket	1 Paket	859 jenis	15.000.000	25.000.000	25.000.000	20.000.000	5.000.000	30.000.000	
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik tersedia	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
		5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5750 lembar, 197245 lembar	1 Paket	1 Paket	5750 lembar, 197245 lembar	20.000.000	60.000.000	60.000.000	19.998.000	- 2.000	60.000.000	

No			Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana						
					APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancanga n Renja 2025	Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2025	Berkurang/ Bertambah	Renja 2026
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (12-9)	14
		6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan			10.000.000	-	30.000.000	24.963.000	14.963.000	30.000.000
		7	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	64 kali	12 Laporan	64 kali	59.000.000	280.000.000	280.000.000	99.975.000	40.975.000	300.000.000	
		8	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	-	2480 exp	-	2480 exp	-	6.500.000	7.500.000	-	-	7.500.000	
		9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD	-	5 aplikasi	-	5 aplikasi	-	150.000.000	10.000.000	-	-	10.000.000	
	6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanan ya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	1 paket	2 Laporan	86 Unit	1 paket	14.000.000	450.000.000	1.020.000.000	83.054.000	69.054.000	420.000.000
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	-	1 unit	-	1 unit	-	-	-	70.000.000	-	-	30.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Pagu Dana					
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancanga n Renja 2025	Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2025	Berkurang/ Bertambah	Renja 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (12-9)	14
	2	Pengadaan Mebel				20 Unit				-	15.554.000	15.554.000	
	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	7 Unit	2 Unit	7 Unit	7 unit	14.000.000	200.000.000	350.000.000	67.500.000	53.500.000	125.000.000
	4	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	11 unit	-	-	11 unit	-	-	-	-	-	
	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	3 paket	-	-	3 paket	-	250.000.000	450.000.000	-	-	165.000.000
	5	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	3 paket	-	-	3 paket	-	-	150.000.000	-	-	100.000.000
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	2 Laporan	1	2 Laporan	100%	1	22.655.100.000	21.170.308.689	23.711.808.689	21.983.560.000	- 671.540.000	21.269.813.596

No			Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Pagu Dana					
					APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancanga n Renja 2025	Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2025	Berkurang/ Bertambah	Renja 2026
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (12-9)	14
			Daerah	an Daerah											
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	2 Laporan	700 keping	2 Laporan	2 Laporan	700 keping	1.500.000	1.450.000	2.000.000	4.960.000	3.460.000	2.500.000
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1	12 Laporan	12 Laporan	1	22.653.600.000	21.168.858.689	23.644.808.689	21.978.600.000	- 675.000.000	21.202.313.596
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan			-			-	65.000.000	-	-	65.000.000
	8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpeliharaan	6 Paket	1	6 Paket		1	190.000.000	1.070.000.000	1.140.000.000	315.100.000	125.100.000	1.070.000.000
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	-	5 unit	-	5 Unit	5 unit	-	125.000.000	150.000.000	75.000.000	7.500.000	162.500.000

No			Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana						
					APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancanga n Renja 2025	Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2025	Berkurang/ Bertambah	Renja 2026
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (12-9)	14
				pajaknya											
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	19 unit	4 Unit	12 Unit	19 unit	90.000.000	250.000.000	225.000.000	100.000.000	10.000.000	225.000.000
		3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	2 unit	2 Unit	2 Unit	2 unit	60.000.000	160.000.000	50.000.000	70.000.000	10.000.000	50.000.000
		4	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara							-	90.000.000	-	-	7.500.000
		5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	15 unit	-	7 Unit	15 unit	15.000.000	35.000.000	75.000.000	20.100.000	5.100.000	75.000.000
		6	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap terpelihara	-	32 unit	-		32 unit	-	-	-	-	-	
		7	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	2 Unit	3 unit	2 Unit	1 Unit	3 unit	25.000.000	300.000.000	200.000.000	50.000.000	25.000.000	200.000.000

No			Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana						
					APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancanga n Renja 2025	Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2025	Berkurang/ Bertambah	Renja 2026
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (12-9)	14
		8	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaa n/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	2 unit	-	2 unit	-	-	250.000.000	-	-	250.000.000	
		9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaa n/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	2 unit	-	2 unit	-	200.000.000	100.000.000	-	-	100.000.000	
2			PROGRAM PENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatn ya penunjang urusan pemerintah an daerah Kabupaten/ Kota yang mendukung standar pelayanan publik	100	100	100	100	100	3.376.300.000	2.660.000.000	6.792.300.000	5.569.621.000	2.193.321.000	3.022.300.000
	1		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/K ota	Tersusunnya a Dokumen Kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokume n	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	30.000.000	30.000.000	10.000.000	-	35.000.000

No				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Pagu Dana					
						APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancanga n Renja 2025	Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2025	Berkurang/ Bertambah	Renja 2026
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (12-9)	14
		1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Ko ta	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	2 paket	2 Dokumen	2 Dokumen	2 paket	10.000.000	30.000.000	30.000.000	10.000.000	-	35.000.000	
	2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/K ota	Tersedianya Dan Terpelihara nya Perlengkap an Jalan Di Jalan Kabupaten/ Kota	100	100	100	100	100	2.278.262.000	1.400.000.000	1.200.000.000	4.242.213.500	1.963.951.500	1.475.000.000	
		1	Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Prasarana jalan tersedia	1 Unit						-	50.000.000	-	-	-	
		2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Perlengkap an Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	10 Unit	1 paket	10 Unit	38 Unit	1 paket	2.178.262.000	900.000.000	735.000.000	3.560.000.000	1.381.738.000	925.000.000	
		3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkap an Jalan yang Terehabilitas i dan Terpelihara	2 Unit	1 paket	2 Unit	2 Unit	1 paket	100.000.000	500.000.000	415.000.000	682.213.500	582.213.500	550.000.000	
	3		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terpenuhi nya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	1 unit	-	-	1	-	100.000.000	600.000.000	-	-	275.000.000	

No			Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Pagu Dana					
					APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancang an Renja 2025	Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2025	Berkurang/ Bertambah	Renja 2026
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (12-9)	14
		1	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah terminal tersedia	-	1 lokasi	-		1 lokasi	-	100.000.000	-	-	-	100.000.000
		2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah halte terbangun	-	2 unit	-	-	2 unit	-	-	500.000.000	-	-	75.000.000
		3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal/fee der terpelihara	-	1 paket	-		1 paket	-	-	100.000.000	-	-	100.000.000
		4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terfasilitasi nya Penyusunan Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1 Dokumen	1 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Kegiatan	50.000.000	75.000.000	150.000.000	55.000.000	5.000.000	150.000.000
		1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	4 Dokumen	1 Kegiatan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Kegiatan	50.000.000	75.000.000	150.000.000	55.000.000	5.000.000	150.000.000

No			Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana						
					APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancanga n Renja 2025	Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2025	Berkurang/ Bertambah	Renja 2026
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (12-9)	14
			Elektronik	Terintegrasi Secara Elektronik											
	5		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatn ya Kualitas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	100	100	100	100	170.000.000	150.000.000	1.835.000.000	170.000.000	-	275.000.000
		1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	-	1 paket	-	1 paket	-	-	1.600.000.000	-	-	15.000.000	
		2	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1 Unit	1 paket	1 Unit	1 Unit	1 paket	30.000.000	-	60.000.000	30.000.000	-	60.000.000
		3	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1600 Dokumen	14.000 kartu	1600 Dokumen	14000 Dokumen	14.000 kartu	40.000.000	50.000.000	75.000.000	40.000.000	-	75.000.000

No			Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana						
					APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancanga n Renja 2025	Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2025	Berkurang/ Bertambah	Renja 2026
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (12-9)	14
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	9 Unit	11 Unit	9 Unit	9 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	125.000.000
	6		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 laporan	100	2 laporan	4 Laporan	100	460.000.000	220.000.000	2.775.000.000	693.957.500	233.957.500	215.000.000
		1	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4 Dokumen	2 paket	4 Dokumen	2 Dokumen	2 paket	350.000.000	220.000.000	2.750.000.000	583.957.500	233.957.500	200.000.000
		2	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan	2 Laporan	2 paket	2 Laporan	2 Laporan	2 paket	110.000.000	-	25.000.000	110.000.000	-	15.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Pagu Dana					
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancanga n Renja 2025	Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2025	Berkurang/ Bertambah	Renja 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (12-9)	14
		Jalan Kabupaten/ Kota											
7	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/K ota	Meningkatn ya Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	2 Laporan	100	2 Laporan	8 Laporan	100	5.000.000	50.000.000	50.000.000	5.000.000	-	60.000.000
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2 Laporan	1	2 Laporan	4 Laporan	1	5.000.000	30.000.000	30.000.000	5.000.000	-	30.000.000
	2 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendas i Andalalin yang Terawasi	-	1	-	-	1	-	20.000.000	20.000.000	-	-	30.000.000
8	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Meningkatn ya Hasil Audit Dan Inspeksi Keselamatan n LLAJ Di Jalan Yang Ditindaklanj uti	2 Laporan	100	2 Laporan	10 Laporan	100	343.038.000	550.000.000	550.000.000	323.950.000	- 19.088.000	400.000.000
	1 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	2 Laporan	8 ok	2 Laporan	8 Laporan	8 ok	75.000.000	200.000.000	200.000.000	60.000.000	- 15.000.000	200.000.000

No				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Pagu Dana					
						APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancanga n Renja 2025	Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2025	Berkurang/ Bertambah	Renja 2026
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (12-9)	14
				Terminal												
		2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	2 paket	12 Laporan	2 Laporan	2 paket	268.038.000	350.000.000	350.000.000	263.950.000	- 4.088.000	200.000.000	
		9	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Yang Laik Jalan	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Laporan	100	-	50.000.000	82.300.000	9.500.000	9.500.000	82.300.000	
		1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang	1 Dokumen	2 unit	1 Dokumen	1 Unit	2 unit	-	-	42.300.000	9.500.000	9.500.000	42.300.000	

No			Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana						
					APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancanga n Renja 2025	Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2025	Berkurang/ Bertambah	Renja 2026
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (12-9)	14
				Tersedia											
		2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Kegiatan	1 Dokumen	-	1 Kegiatan	-	50.000.000	40.000.000	-	-	40.000.000
	10		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100	60.000.000	35.000.000	120.000.000	60.000.000	-	55.000.000

No			Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana						
					APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancanga n Renja 2025	Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2025	Berkurang/ Bertambah	Renja 2026
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (12-9)	14
		1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80 orang	1 Dokumen	1 Dokumen	80 orang	35.000.000	10.000.000	70.000.000	35.000.000	-	30.000.000
		2	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3 kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	3 kegiatan	25.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000	-	25.000.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

4.2 Program Prioritas dan Rencana Implementasi

Dalam rangka mendukung program prioritas Bupati Demak, dapat dijelaskan program prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Pemasangan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas);
2. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan;
3. Pembuatan Marka Jalan;
4. Pemasangan CCTV;
5. Pemeliharaan CCTV;
6. Pemasangann Rambu Lalu Lintas.

Tabel rencana program prioritas dan rencana implementasi Dinas Kabupaten Demak sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2025

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	s.d. 2023		2024		2025		Target s.d. Akhir Renstra (2026)	Kode Subkegiatan	Ket.
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, TERUTAMA DI KAWASAN PESISIR, PERTANIAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN/ PUSAT PRODUKSI												
a	Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten	Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	km										
7	Pemasangan Rambu Lalu Lintas	Jumlah rambu lalu lintas tersedia	unit	67	91	123.974.000,00	66	94.050.000,00	43	128.695.000,00	455	2.15.02.2.06.0016	
8	Pemasangan APILL	Jml APILL (Traffic Light/Warning Light) terpasang	paket		1	79.653.600,00	-	-	2	74.000.000,00	9	2.15.02.2.02.0002	
9	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Jml lampu penerangan jalan terpasang	Lokasi		6	2.992.917.000,00	5	1.550.000.000,00	17	3.460.000.000,00	20	2.15.02.2.02.0002	
10	Pembuatan Marka Jalan	Jml marka jalan tersedia	m2		1.514,00	294.454.000,00	780	210.400.000,00	574,46	132.125.000,00	1.300,00	2.15.02.2.06.0016	
11	Pemasangan CCTV	Jml CCTV terpasang	paket		4	99.500.000,00	-	-	1	16.200.000,00	8	2.15.02.2.02.0002	
12	Pemeliharaan CCTV	Jml CCTV jalan terpelihara	Lokasi		11	127.925.000,00	2	20.000.000,00	-	-	12	2.15.02.2.02.0004	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan. Oleh karena itu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berisi tentang Program dan Kegiatan dalam waktu 1 (satu) tahun yang akan dilaksanakan sebagai pelaksanaan dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun sebelumnya. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah juga memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu dan permasalahan yang ditemui. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah juga merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

a. Catatan penting

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak tahun 2025 disusun dengan melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dapat dilihat dari diakomodirnya usulan-usulan dari masyarakat melalui Musrenbang dan Pokok Pikiran (Pokkir) Dewan.

Pengalokasian anggaran tentunya menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran/ pengalokasian anggaran yang diberikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Demak serta sumber pendanaan lainnya. Seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program/ kegiatan yang indikator kinerjanya belum memenuhi target lebih diprioritaskan untuk mendapatkan anggaran yang cukup memadai.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perencanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang baik dapat dijadikan dasar pelaksanaan dan merupakan kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholder*), tetap harus dikedepankan.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Demak akan melakukan pemantauan, tindakan koreksi sesuai yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala setiap bulan kepada Bupati Demak melalui Bappeda-Litbang Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Rencana tindak lanjut.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program dan kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan

mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan sebagaimana amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak ini sangat tergantung pada peran aktif seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Demak (pimpinan dan staf) serta pihak eksternal terkait secara bersih, akuntabel, aspiratif, partisipatif, dan transparan.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam Tahun Anggaran 2025.

Lampiran 1.

PENYESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA PADA RENSTRA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021-2026

DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN
INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

SEMULA								MENJADI								KET		
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	%	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	%	
2	15	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja	Dokumen	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	Dokumen	

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
						Daerah	perangkat daerah								Daerah			
2	15	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	
2	15	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	
2	15	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	

SEMULA								MENJADI								KET		
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	
2	15	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	
2	15	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	
2	15	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	
2	15	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	
2	15	1	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	
2	15	1	202	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	15	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	
2	15	1	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	

SEMULA									MENJADI										KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
2	15	1	202	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	15	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		
2	15	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan		
2	15	1	202	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	15	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	Dokumen	2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	Laporan	
2	15	1	203	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	15	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	
2	15	1	203	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	15	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	
2	15	1	203	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	2	15	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	

SEMULA									MENJADI										KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
2	15	1	203	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	15	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		
2	15	1	203	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	15	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		
2	15	1	203	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	15	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		
2	15	1	203	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	15	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		

SEMULA								MENJADI								KET		
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	204		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang sudah direkonsiliasi		2	15	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang sudah direkonsiliasi	Dokumen	
2	15	1	204	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	2	15	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	
2	15	1	204	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	2	15	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	
2	15	1	204	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	2	15	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	204	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	2	15	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	
2	15	1	204	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	2	15	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	
2	15	1	204	6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	2	15	01	2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	
2	15	1	204	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	2	15	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	
2	15	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi		2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	

SEMULA								MENJADI										KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	205	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	15	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	
2	15	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	
2	15	1	205	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	
2	15	1	205	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	15	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	
2	15	1	205	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	15	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	205	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	2	15	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	
2	15	1	205	7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	2	15	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	
2	15	1	205	8	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan	Orang	2	15	01	2.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan	Orang	
2	15	1	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	
2	15	1	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	15	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	

SEMULA								MENJADI										KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	
2	15	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	
2	15	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	
2	15	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	
2	15	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	
2	15	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	
2	15	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	
2	15	1	206	7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	15	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket	
2	15	1	206	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	
2	15	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	
2	15	1	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	15	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	
2	15	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan		2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit	
2	15	1	207	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	207	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	
2	15	1	207	3	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	2	15	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	
2	15	1	207	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	2	15	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	
2	15	1	207	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	
2	15	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	
2	15	1	207	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	15	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	
2	15	1	207	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang	Unit	2	15	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
							Disediakan											
2	15	1	207	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	
2	15	1	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	15	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	
2	15	1	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	15	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	
2	15	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia		2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	%	

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	
2	15	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	
2	15	1	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	
2	15	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	

SEMULA								MENJADI										KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara		2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	Unit	
2	15	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	
2	15	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	

SEMULA								MENJADI										KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	209	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	2	15	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	
2	15	1	209	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	2	15	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	
2	15	1	209	5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	15	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	
2	15	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	
2	15	1	209	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	15	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	209	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	15	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	
2	15	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	
2	15	1	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	
2	15	1	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	15	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	

SEMULA								MENJADI										KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	1	209	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	2	15	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang mendukung standar pelayanan publik	Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	Persen	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang mendukung standar pelayanan publik	Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	%	
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen pengelolaan jaringan transportasi dan Lalu Lintas Jalan tersedia .	Dokumen	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen pengelolaan jaringan transportasi dan Lalu Lintas Jalan tersedia .	Dokumen	
2	15	02	201	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	

SEMULA								MENJADI										KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	201	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Dokumen	
2	15	02	201	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Laporan	2	15	02	2.01	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota				
									2	15	02	2.01	0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Dokumen	
									2	15	02	2.01	0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Dokumen	

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
									2	15	02	2.01	0006	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	
									2	15	02	2.01	0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dan Terpeliharanya Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase sarana perlengkapan dalam kondisi baik	Persentase	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dan Terpeliharanya Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase sarana perlengkapan dalam kondisi baik	%	
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	

SEMULA								MENJADI										KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terpenuhinya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe C terkelola .	Unit	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terpenuhinya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe C terkelola .	Unit	
2	15	02	203	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen	2	15	02	2.03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen	
2	15	02	203	02	Pembangunan Gedung Terminal	Terbangunnya Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit	2	15	02	2.03	0002	Pembangunan Gedung Terminal				
2	15	02	203	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Unit	2	15	02	2.03	0003	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal				

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	203	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	15	02	2.03	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)				
2	15	02	203	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	2	15	02	2.03	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C				
									2	15	02	2.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya pengawasan terminal penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Dokumen	
									2	15	02	2.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
									2	15	02	2.03	0008	Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	Tersedianya sistem informasi manajemen terminal Penumpang tipe C	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	Unit	
									2	15	02	2.03	0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	
									2	15	02	2.03	0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	Orang	
									2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terfasilitasinya Penyusunan Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraa n Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan izin dan fasilitas parkir terlaksana.	Dokumen	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terfasilitasinya Penyusunan Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraa n Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan izin dan fasilitas parkir terlaksana.	Dokumen	
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	2	15	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan	Laporan	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnva	Laporan	

SEMULA								MENJADI								KET		
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
					Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota							Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kualitas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase uji KIR angkutan umum	Persentase	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kualitas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase uji KIR angkutan umum	Persentase	
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	
2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisa si Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2	15	02	2.05	0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	
2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan	2	15	02	2.05	0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	

SEMULA									MENJADI										KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan		
2	15	02	2.05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Ditetapkannya Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2	15	02	2.05	0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Ditetapkannya Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan		
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan		
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas terlaksana	Laporan	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas terlaksana	Laporan		

SEMULA								MENJADI								KET		
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	206	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	2	15	02	2.06	0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				
2	15	02	206	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	2	15	02	2.06	0002	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				
2	15	02	206	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Uji Coba dan Tersosialisasinya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.06	0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				

SEMULA									MENJADI									KET	
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
2	15	02	206	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan		
2	15	02	206	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	2	15	02	2.06	0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota					
									2	15	02	2.06	0006	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terpenuhinya dan Terbitnya Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dokumen		
									2	15	02	2.06	0007	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	Laporan		

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
									2	15	02	2.06	0008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Terbangunnya Rute Aman Selamat Sekolah	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	Unit	
									2	15	02	2.06	0009	Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan	
									2	15	02	2.06	0010	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan	
									2	15	02	2.06	0011	Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Meningkatnya Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	
									2	15	02	2.06	0012	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Terbangunnya implementasi batas kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	Unit	

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
									2	15	02	2.06	0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Unit	
									2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	
									2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	
									2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dokumen	

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
									2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provin si	Laporan	
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah andalalin tersedia	Laporan	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah andalalin tersedia	Laporan	
2	15	02	207	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	2	15	02	2.07	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin				
2	15	02	207	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Meningkatnya Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	2	15	02	2.07	0002	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin				

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	207	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	
2	15	02	207	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	2	15	02	2.07	0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin				
									2	15	02	2.07	0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Orang	
									2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Laporan	
									2	15	02	2.07	0007	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Dokumen	

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Meningkatnya Hasil Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan tersedia	Laporan	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Meningkatnya Hasil Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan tersedia	Laporan	
2	15	02	208	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	2	15	02	2.08	0001	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ				
2	15	02	208	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2	15	02	2.08	0002	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				
2	15	02	208	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	

SEMULA								MENJADI										KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	208	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	
2	15	02	208	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	15	02	2.08	0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				
									2	15	02	2.08	0006	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Laporan	
									2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen	Laporan	

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
														Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		
									2	15	02	2.08	0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	
									2	15	02	2.08	0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a Yang Laik Jalan	Jumlah Penyedian Angkutan Umum	Laporan	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a Yang Laik Jalan	Jumlah Penyedian Angkutan Umum	Laporan	

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	209	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Unit	2	15	02	2.09	0001	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
2	15	02	209	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Laporan	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Laporan	

SEMULA								MENJADI										KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
									2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	
2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	

SEMULA								MENJADI								KET		
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	2.10	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.10	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	
2	15	02	2.10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.10	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlayannya jaringan trayek angkutan perkotaan	Dokumen	2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	
2	15	02	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.11	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	
2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.11	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	
2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	2.12	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	15	02	2.12	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	
2	15	02	2.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	15	02	2.12	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	
2	15	02	2.13		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	15	02	2.13		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	2.13	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terciptanya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	15	02	2.13	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terciptanya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	
2	15	02	2.13	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	15	02	2.13	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	

SEMULA								MENJADI								KET		
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
									2	15	02	2.13	0003	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	
									2	15	02	2.13	0004	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	

SEMULA								MENJADI								KET		
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	
2	15	02	214	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	2	15	02	2.14	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	214	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	
									2	15	02	2.14	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	
2	15	02	2.15		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota terlaksana.	Dokumen	2	15	02	2.15		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota terlaksana.	Dokumen	

SEMULA								MENJADI								KET		
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	15	02	215	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	2	15	02	2.15	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
2	15	02	215	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	2	15	02	2.15	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota				

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
									2	15	02	2.15	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terpenuhinya Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	Unit	
									2	15	02	2.15	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	
2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah	Dokumen Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah	Dokumen	2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah	Dokumen Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	

SEMULA								MENJADI										KET	
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
						Daerah Kabupaten/ Kota a	Kabupaten/ Kota a								Daerah Kabupaten/ Kota				
2	15	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.16	0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		
2	15	02	2.16	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	15	02	2.16	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		
2	15	02	2.16	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2	15	02	2.16	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		

SEMULA									MENJADI									KET
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
									2	15	02	2.16	0004	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Terselenggaranya Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Dokumen	

Keterangan :



Kode Nomenklatur Nonaktif Subkegiatan



Rekomendasi Penggantian Kode Nomenklatur Subkegiatan Yang Dinonaktifkan



FORM E.60

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dae rah Dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan (suboutput)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026	Realisasi Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2023				
							TW I		TW II		TW III		TW IV									
							9		10		11		12									
4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15 = 4/6x100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Dinas Perhubungan																						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		%	100	33.040.309.023	100	29.766.554.415	100	32.493.631.400	20	6.445.047.726	24	7.835.177.865	26	8.466.654.822	29	9.492.574.204	99	32.239.454.617	99	32.239.454.617	99	98
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN	%	95,9	30.010.309.023	88	24.524.895.048	89	27.159.511.400	20	6.188.555.226	22	6.779.143.415	23	6.862.119.542	23	7.125.687.718	99	26.955.505.901	99	26.955.505.901	103	90
Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	100	6.102.995.427	100	4.194.688.870	2	4.265.674.400	2	786.198.373	2	1.202.397.906	2	995.650.996	2	1.165.871.198	2	4.150.118.473	2	4.150.118.473	2	68
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/ Bulan	28	4.677.995.427	12	3.039.361.190	27	3.036.110.000	24	507.831.951	24	895.552.612	26	681.607.784	27	866.808.059	27	2.951.800.406	27	2.951.800.406	96	63
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	47	1.425.000.000	47	1.155.327.680	12	1.229.564.400	3	278.366.422	3	306.845.294	3	314.043.212	3	299.063.139	12	1.198.318.067	12	1.198.318.067	26	84
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Yang Terpenuhi	%	100	300.000.000	100	166.990.220	100	207.935.674	5	7.121.174	6	12.445.500	-	-	89	185.155.452	100	204.722.126	100	204.722.126	100	68
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	82	150.000.000	84	166.990.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	75	150.000.000	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	84	-	-	-	85	207.935.674	2	7.121.174	3	12.445.500	-	-	80	185.155.452	85	204.722.126	85	204.722.126	101	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Yang Terpenuhi	%	100	832.000.000	100	266.865.335	100	267.120.000	23	54.543.075	26	72.841.132	28	74.987.240	23	61.973.205	100	264.344.652	100	264.344.652	100	32
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Paket	228	30.000.000	228	19.984.500	1	16.524.400	1	3.767.175	1	3.092.340	1	4.053.540	1	5.508.985	1	16.422.040	1	16.422.040	0	55

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dae rah Dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan (suboutput)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026		Realisasi Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2023	
									TW I		TW II		TW III		TW IV							
			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Bangunan Kantor Yang Tersedia																					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	250.000.000	6.454	123.282.600	4	125.245.600	1	28.044.400	1	27.945.100	1	34.561.400	1	33.285.000	4	123.835.900	4	123.835.900	80	50
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	859	30.000.000	1	14.532.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	65.000.000	203.590	45.853.700	1	42.310.000	1	9.118.000	1	8.857.000	1	14.126.800	1	10.147.000	1	42.248.800	1	42.248.800	100	65
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	64	300.000.000	402	63.211.935	10	83.040.000	1	13.613.500	5	32.946.692	3	22.245.500	1	13.032.220	10	81.837.912	10	81.837.912	16	27
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2.480,00	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	Unit	1	480.000.000	1	7.800.000	9	121.100.000	-	-	-	-	6	46.700.000	3	72.600.000	9	119.300.000	9	119.300.000	900	25
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	200.000.000	7	7.800.000	9	121.100.000	-	-	-	-	6	46.700.000	3	72.600.000	9	119.300.000	9	119.300.000	129	60
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia	%	100	21.200.313.596	100	19.447.861.023	100	21.760.280.134	24	5.301.484.404	25	5.398.113.877	26	5.513.740.306	25	5.469.928.043	100	21.683.266.630	100	21.683.266.630	100	102
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	700	1.500.000	700	1.200.000	4	1.500.000	3	1.000.000	-	-	1	500.000	-	-	4	1.500.000	4	1.500.000	1	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	12	21.198.813.596	12	19.446.661.023	12	21.758.780.134	3	5.300.484.404	3	5.398.113.877	3	5.513.240.306	3	5.469.928.043	12	21.681.766.630	12	21.681.766.630	100	102

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan (suboutput)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026	Realisasi Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2023			
						TW I		TW II		TW III		TW IV										
4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13	15 = 4/6x100										
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Unit	100	1.095.000.000	100	440.689.600	29	537.401.192	2	39.208.200	10	93.345.000	5	231.041.000	12	170.159.820	29	533.754.020	29	533.754.020	29	49
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	250.000.000	18	144.749.600	10	209.938.192	1	35.958.200	3	68.625.000	2	37.075.000	4	66.711.820	10	208.370.020	10	208.370.020	53	83
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	2	175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	45.000.000	25	27.000.000	15	36.520.000	1	3.250.000	4	7.920.000	1	3.660.000	9	21.520.000	15	36.350.000	15	36.350.000	100	81
Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	300.000.000	4	268.940.000	3	288.443.000	-	-	1	16.800.000	1	190.306.000	1	79.528.000	3	286.634.000	3	286.634.000	100	96
Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	1	2.500.000	-	-	-	-	-	-	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	-	-
PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGA N DALAM KONDISI BAIK	%	100	3.030.000.000	100	5.241.659.367	100	5.334.120.000	5	256.492.500	20	1.056.034.450	30	1.604.535.280	44	2.366.886.486	99	5.283.948.716	99	5.283.948.716	99	174
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Dokumen Pengelolaan Jaringan Transportasi dan Lalu Lintas Tersedia Kabupaten/ Kota	Dokumen	100	35.000.000	100	19.854.000	1	15.000.000	1	1.350.000	1	11.275.000	1	2.375.000	-	-	1	15.000.000	1	15.000.000	1	43
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	35.000.000	2	19.854.000	2	15.000.000	2	1.350.000	2	11.275.000	2	2.375.000	-	-	2	15.000.000	2	15.000.000	100	43
Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Sarana Perengkapan Jalan Dalam	%	100	1.350.000.000	100	4.156.932.447	100	3.804.500.000	10	71.210.000	20	834.066.000	30	1.326.389.000	40	1.542.755.500	100	3.774.420.500	100	3.774.420.500	100	280

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan (suboutput)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026	Realisasi Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2023					
						TW I		TW II		TW III		TW IV			13		14 = 13		15 = 4/6x100			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13	15 = 4/6x100										
	Kondisi Baik		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Unit	1	800.000.000	4	4.156.932.447	50	3.654.500.000	16	71.210.000	10	834.066.000	20	1.326.389.000	28	1.394.160.200	74	3.625.825.200	74	3.625.825.200	7.400	453
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	550.000.000	-	-	2	150.000.000	-	-	-	-	2	148.595.300	2	148.595.300	2	148.595.300	200	27		
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C Terkelola	Unit	100	200.000.000	-	-	1	200.000.000	-	-	-	-	1	198.939.000	1	198.939.000	1	198.939.000	1	99		
Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit	1	-	-	-	1	200.000.000	-	-	-	-	1	198.939.000	1	198.939.000	1	198.939.000	100	-		
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Unit	2	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penertiban Izin dan Fasilitas Parkir Terlaksana	Dokumen	100	75.000.000	100	119.204.800	4	212.000.000	1	18.087.500	1	8.475.000	1	11.474.000	1	170.168.300	4	208.204.800	4	278		
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	75.000.000	1	119.204.800	4	212.000.000	1	18.087.500	1	8.475.000	1	11.474.000	1	170.168.300	4	208.204.800	400	278		
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Uji KIR Angkutan Umum	%	100	235.000.000	100	273.559.270	100	227.420.000	26	58.580.000	5	9.810.000	56	128.409.780	13	29.188.186	100	225.987.966	100	96		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	1	50.000.000	1	74.698.000	854	71.420.000	94	7.500.000	94	7.500.000	447	37.414.500	219	18.283.186	854	70.697.686	854	85.400	141	
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan	Dokumen	14.000	60.000.000	14.000	125.000.000	14.000	50.000.000	14.000	50.000.000	-	-	-	-	-	-	14.000	50.000.000	14.000	50.000.000	100	83

Urusan/Bidang Pemerintahan Dae rah Dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan (suboutput)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026	Realisasi Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2023					
						TW I		TW II		TW III		TW IV			13		14 = 13		15 = 4/6x100			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13	15 = 4/6x100										
	Bermotor		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	9	125.000.000	12	73.861.270	9	106.000.000	1	1.080.000	1	2.310.000	5	90.995.280	2	10.905.000	9	105.290.280	9	105.290.280	100	84
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Terlaksana	Laporan	100	350.000.000	100	44.097.600	2	212.570.000	2	7.230.000	2	5.129.000	2	7.085.000	2	186.340.000	2	205.784.000	2	205.784.000	2	59
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	3	350.000.000	2	44.097.600	50	202.570.000	2	6.200.000	1	3.160.000	2	5.600.000	45	181.325.000	50	196.285.000	50	196.285.000	1.66 7	56
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Laporan	-	-	-	-	2	10.000.000	2	1.030.000	2	1.969.000	2	1.485.000	2	5.015.000	2	9.499.000	2	9.499.000	-	-
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Andalalin Tersedia	Laporan	100	60.000.000	100	8.679.500	9	7.430.000	-	-	2	1.480.000	3	2.187.500	4	3.617.500	9	7.285.000	9	7.285.000	9	12
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	1	30.000.000	2	8.679.500	10	7.430.000	-	-	2	1.480.000	3	2.187.500	5	3.617.500	10	7.285.000	10	7.285.000	1.00 0	24
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	1	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Tersedia	Laporan	100	600.000.000	100	265.458.000	24	575.200.000	4	91.100.000	6	136.125.000	5	120.490.000	9	224.008.000	24	571.723.000	24	571.723.000	24	95
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	8	200.000.000	1	150.000.000	12	119.200.000	3	27.600.000	3	30.800.000	3	28.800.000	3	32.000.000	12	119.200.000	12	119.200.000	150	60
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	400.000.000	2	115.458.000	12	456.000.000	2	63.500.000	3	105.325.000	2	91.690.000	5	192.008.000	12	452.523.000	12	452.523.000	600	113
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum	Laporan	100	70.000.000	100	29.998.750	1	22.800.000	1	7.225.000	1	7.700.000	1	3.055.000	1	1.700.000	1	19.680.000	1	19.680.000	1	28

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dae rah Dan Program/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan (suboutput)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026	Realisasi Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2023	
						TW I		TW II		TW III		TW IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota		14 = 13			15 = 4/6x100			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13	15 = 4/6x100										
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Unit	2	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Laporan	1	50.000.000	1	29.998.750	1	22.800.000	1	7.225.000	1	7.700.000	1	3.055.000	1	1.700.000	1	19.680.000	1	19.680.000	100	39
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlayannya Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan	Dokumen	100	55.000.000	100	323.875.000	3	57.200.000	3	1.710.000	3	41.974.450	3	3.070.000	3	10.170.000	3	56.924.450	3	56.924.450	3	104
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasiny a Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Dokumen	80	20.000.000	1	323.875.000	2	32.200.000	2	1.710.000	2	22.000.000	-	-	2	8.240.000	2	31.950.000	2	31.950.000	3	160
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	3	35.000.000	-	-	1	25.000.000	-	-	1	19.974.450	1	3.070.000	1	1.930.000	1	24.974.450	1	24.974.450	33	71

Sumber; Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024